

# SINERGI

BULETIN BPIW

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR  
BADAN PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR WILAYAH



[www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)



Edisi 13/Januari 2017

**2 Tahun Berkarya,  
BPIW Hasilkan 10 Produk  
Strategis**

**Aplikasi Simonah  
Kementerian PUPR**

**Produk Strategis dan  
Dukungan Inovasi Aplikasi**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

# **INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI**



**Gedung BPIW Lantai 1**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

Telp. +6221-2751 5804

# SINERGI

BULETIN BPIW

**Pelindung:**

Rido Matari Ichwan

**Penasehat:**

Dadang Rukmana

**Pengarah:**

Bobby Prabowo  
Harris H. Batubara  
Hadi Sucahyono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Pemimpin Redaksi:**

P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana:**

Shoviah

**Redaksi:**

M. Salahudin Rasyidi  
Mochammad Tranggono  
Hari Suharto Diyaksa  
Erwin Adhi Setyadi  
Wahyu Hendrastomo  
Melva Eryani Marpaung

**Editor :**

Hendra Djamal

**Kontributor:**

Mutri Batul Aini  
Ichlasul Naufal  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah

---

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
(BPIW) Kementerian PUPR

---

**Alamat Redaksi:**

Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)  
Twitter: @informasiBPIW  
Youtube: Layanan Informasi BPIW  
Facebook: BPIWkementerianPUPR  
No. Telp. +6221-2751 5804

---

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

---

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, membuka lembar baru tahun 2017, Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, kembali hadir dengan serangkaian informasi yang bermanfaat. Pada Edisi 13 di bulan Januari ini, seperti pada Kabar Utama, dimana dibahas mengenai 10 produk yang dihasilkan BPIW selama 2 tahun berkarya untuk negeri. Pada laporan khusus dibahas mengenai aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (Simonah).

Pada awal tahun ini, Buletin Sinergi menghadirkan rubrik baru yang diberi judul "Obras (Obrolan Santai) Infrastruktur". Dalam rubrik ini ditampilkan karikatur dengan tokoh utama "Bang Egi". Kata "Egi" disingkat dari "Sinergi", yang merupakan tugas BPIW dalam melakukan sinergi dengan seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pada rubrik ini diobrolkan secara singkat, satu topik tentang infrastruktur dengan gaya yang khas.

Rubrik lain tidak mengalami perubahan, seperti rubrik Wawancara, menghadirkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan, yang membahas mengenai program-program strategis yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Januari melalui rubrik Kilas BPIW. Sajian ringan juga disajikan seperti Tips, Teknologi, dan Glossary. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

04



**01 SALAM REDAKSI**

**02 DAFTAR ISI**

**03 PERSPEKTIF**

Produk Strategis dan Dukungan Inovasi Aplikasi

**04 KABAR UTAMA**

2 Tahun Berkarya, BPIW Hasilkan 10 Produk Strategis

**10 REVIEW**

Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia

**11 GLOSSARY**

Istilah Tentang Keterpaduan dan Pertumbuhan

12



**12 WAWANCARA**

Program Pengembangan Wilayah Dipertajam

**16 TEROPONG MEDIA**

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

**18 KILAS BPIW**

Kementerian PUPR Dorong Kedaulatan Pangan Nasional

18



36



**36 LAPORAN KHUSUS**

Aplikasi Simonah Kementerian PUPR, Inovasi Solusi dalam Data Pengadaan Tanah

**40 OPINI**

Budaya Kerja BPIW

**46 INFOGRAFIS**

Program Pembangunan Jangka pendek 2019 - 2020

**48 JALAN-JALAN**

Keindahan Alam yang Memikat di Lembata

**50 WPS CORNER**

Wilayah Pengembangan Strategis 17 & 18

**52 TEKNOLOGI**

Teknologi Flyslab, Lantai Beton Bertingkat Jadi Efisien

**56 POTRET**

Menuju Pembangunan yang Berkeadilan

**57 TIPS**

7 Cara Meningkatkan Produktivitas Kerja

**58 TOKOH**

Dr. Burhan Abdurahman

Membangun Kota Butuh Partisipasi Seluruh Elemen Masyarakat

58



# Produk Strategis dan Dukungan Inovasi Aplikasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru berdiri 2 tahun, namun telah melahirkan produk-produk strategis yang dapat menjadi *guidance* atau pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berbasis pengembangan wilayah.

10 produk strategis yang dihasilkan BPIW tersebut, tentunya berpijak pada tugas dan fungsi BPIW yang didasari pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Ke 10 produk itu terdiri dari, Pertama, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Kedua, 7 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR. Ketiga, 35 Masterplan dan *Development Plan* WPS. Keempat, 12 *Masterplan* dan *Development Plan* Kawasan Strategis. Kelima, 22 *Masterplan* dan *Development Plan* Kawasan Perkotaan, serta 8 *Feasibility Studi* (FS/Studi Kelayakan) dan Pra Desain Kawasan Perkotaan.

Keenam, 26 *Masterplan* dan *Development Plan* Kawasan Perdesaan Strategis (KPS) dan 14 *Development Plan* dan *Masterplan* KPPN. Ketujuh, Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program 35 WPS, Kedelapan, Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan. Total kebutuhan APBN dalam kurun waktu 5 tahun mencapai Rp 789,04 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut untuk pembangunan baru, rehabilitasi dan pelebaran. Kesembilan, 3 Lokasi Penyiapan Proses *Loan World Bank* untuk *Integrated Tourism Master Plan* dan kesepuluh adalah Dukungan Sistem Informasi.

Dukungan sistem informasi tersebut mulai dari Sistem Manajemen Pelaksanaan Keterpaduan Program Infrastruktur

Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis, Bank Data BPIW, Sistem Informasi Pemrograman, Database Perkotaan, dan Sistem Monitoring Tanah (Simonah).

Terkait kehadiran aplikasi Simonah ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang tanah yang tidak tumpang tindih, dapat diakses serta dapat dilihat oleh seluruh insan Kementerian PUPR baik pusat maupun di daerah.

Simonah saat ini telah terintegrasi dengan e-monitoring Kementerian PUPR. Sehingga, melalui aplikasi tersebut penyajian data secara komprehensif dan tertib diharapkan dapat terwujud. Sehingga, unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR dan institusi pemerintah lain yang ada di pusat maupun daerah dapat menggunakan aplikasi tersebut.

Simonah lahir dilatarbelakangi adanya kebutuhan terhadap perangkat yang memberikan kemudahan dalam memfasilitasi pengadaan tanah di lingkungan Kementerian PUPR. Perangkat berupa sistem informasi berbasis web dinilai dapat menjadi solusi era digital saat ini. Sebab, akan dapat di akses dengan cepat melalui jaringan internet. Dari sisi pencapaian sasaran strategis BPIW yang ada di dalam Renstra PUPR.”(\*)

# 2 Tahun Berkarya, BPIW Hasilkan 10 Produk Strategis



Akses Tanjung Priok DKI Jakarta, infrastruktur yang ditergetkan selesai pada tahun 2017

Sumber: Dok. PUPR

Tahun 2017 ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), baru memasuki usia 3 tahun. Bila diibaratkan seorang anak, BPIW masih tergolong balita. Namun sebagai sebuah instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kementerian PUPR, BPIW telah banyak mengeluarkan karya. Saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR, 17 Januari lalu, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menyatakan BPIW telah menghasilkan 10 produk strategis terkait perencanaan infrastruktur PUPR, dalam kurun waktu 2 tahun, yakni 2015 dan 2016.



Produk-produk strategis yang dihasilkan BPIW tersebut, tentunya berpijak pada tugas dan fungsi BPIW yang didasari pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Pada raker yang mengambil tema "Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkeadilan" itu, Rido menuturkan selama 2 tahun itu, BPIW harus menyusun beberapa hal seperti rencana keterpaduan program di kawasan strategis, keterpaduan program di kawasan perkotaan, dan penyusunan keterpaduan program PUPR. "BPIW juga melakukan program tahunan, yang selanjutnya masuk ke sistem biro perencanaan. Tahun 2017 ini, kita juga sedang menyusun program infrastruktur untuk tahun 2018," ungkapnya.

Menurut Rido ada beberapa dokumen penting yang dihasilkan dari 10 produk tersebut, yakni *masterplan* dan *development plan*, rencana infrastruktur, penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan.

Pada kesempatan itu, Rido menjabarkan ke-10 produk tersebut sebagai berikut :

#### 1. Renstra Kementerian PUPR 2015-2019

Menurut Rido, Rencana Strategis atau Renstra Kementerian PUPR, memuat misi dan sasaran pembangunan Kementerian PUPR. Rido juga

memaparkan mengenai capaian pembangunan infrastruktur tahun 2015 dan 2016, pada sektor Sumber Daya Air (SDA), Jalan, Cipta Karya, dan Perumahan.

Beberapa target tahun 2015, seperti 29 pembangunan waduk (13 baru, 16 lanjutan, dan 5 waduk telah selesai dibangun). Pembangunan infrastruktur tersebut untuk sektor SDA. Selanjutnya, pada Sektor Jalan, salah satu targetnya adalah 1.286 km. Untuk Sektor Cipta Karya salah satu targetnya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mencapai 7.349 liter/detik (1.286.330 SR = 5.634.125 jiwa). Kemudian untuk Sektor Perumahan pembangunan rumah khusus sebanyak 6.713 unit.

Sedangkan tahun 2016, target awal pembangunan infrastruktur beberapa diantaranya yakni 298.000 hektar rehabilitasi jaringan irigasi (Sektor SDA), peningkatan jembatan sepanjang 4.751 m (Sektor Jalan), penyelesaian 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 9 lokasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Sektor Cipta Karya), dan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 10.458 unit (Sektor Perumahan).

Dari sisi sasaran strategis BPIW yang ada di dalam Renstra PUPR, maka untuk peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR

Rido menuturkan selama 2 tahun itu, BPIW harus menyusun beberapa hal seperti rencana keterpaduan program di kawasan strategis, keterpaduan program di kawasan perkotaan, dan penyusunan keterpaduan program PUPR.

Rencana induk ini telah dibuat di 7 pulau besar di Indonesia, yakni Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Pulau Sulawesi, Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Papua. Sehubungan dengan hal itu, BPIW telah membuat masterplan Pulau Sumatera 2015-2025.

antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, tahun 2015 ditargetkan 80%, dan realisasinya mencapai 77%. Sedangkan untuk peningkatan keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, dari target 80%, realisasinya juga 80%.

Pada tahun 2016, untuk peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, ditargetkan mencapai 85%. Sementara realisasinya mencapai 85,47%. Kemudian untuk peningkatan keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dari target 85%, maka realisasinya mencapai 81,27%.

**2. 7 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR**

Rencana induk ini telah dibuat di 7 pulau besar di Indonesia, yakni Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Sehubungan dengan hal itu, BPIW telah membuat *masterplan* seperti *Masterplan* Pulau Sumatera 2015-2025. Pada *Masterplan* tersebut, banyak program yang telah direncanakan, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.865 km. Jalan tol ini mulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung) hingga Banda Aceh.

Kemudian juga telah dibuat *Development Plan* Pulau Sumatera 2015-2019. Pada *development plan* ini meliputi 6 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Pulau Sumatera yakni WPS 1 Sabang - Banda Aceh - Langsa, WPS 2 Medan - Tebingtinggi - Dumai - Pekanbaru, WPS 3 Batam - Tanjungpinang, WPS 4 Sibolga - Padang - Bengkulu, WPS 5 Jambi - Palembang - Pangkalpinang - Tanjungpandan, dan WPS 6 Merak - Bakauheni - Bandar Lampung - Palembang - Tanjung Api-api.

**3. 35 Masterplan dan Development Plan WPS**

Ke-35 masterplan dan development plan tersebut seperti *Masterplan* Pengembangan Kawasan Pertumbuhan di WPS 2 Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru 2025 (tematik KPS), *Masterplan* Pengembangan Infrastruktur Strategis di WPS 2 Metro Medan - Tebing Tinggi - Dumai - Pekanbaru 2025 dan *Development Plan* WPS 2 Metro Medan - Tebing Tinggi - Dumai - Pekanbaru Tahun 2015-2019 (Program Utama).

Dasar pertimbangan dari *masterplan* dan *development plan* tersebut adalah percepatan pembangunan infrastruktur, efisiensi dan efektivitas, daya dukung dan daya tampung, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan dalam melaksanakan *masterplan* dan *development plan* WPS ini yakni memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven*, keterpaduan perencanaan : antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan. Selain itu juga terkait sinkronisasi program yakni dalam hal fungsi, lokasi, waktu dan dana.

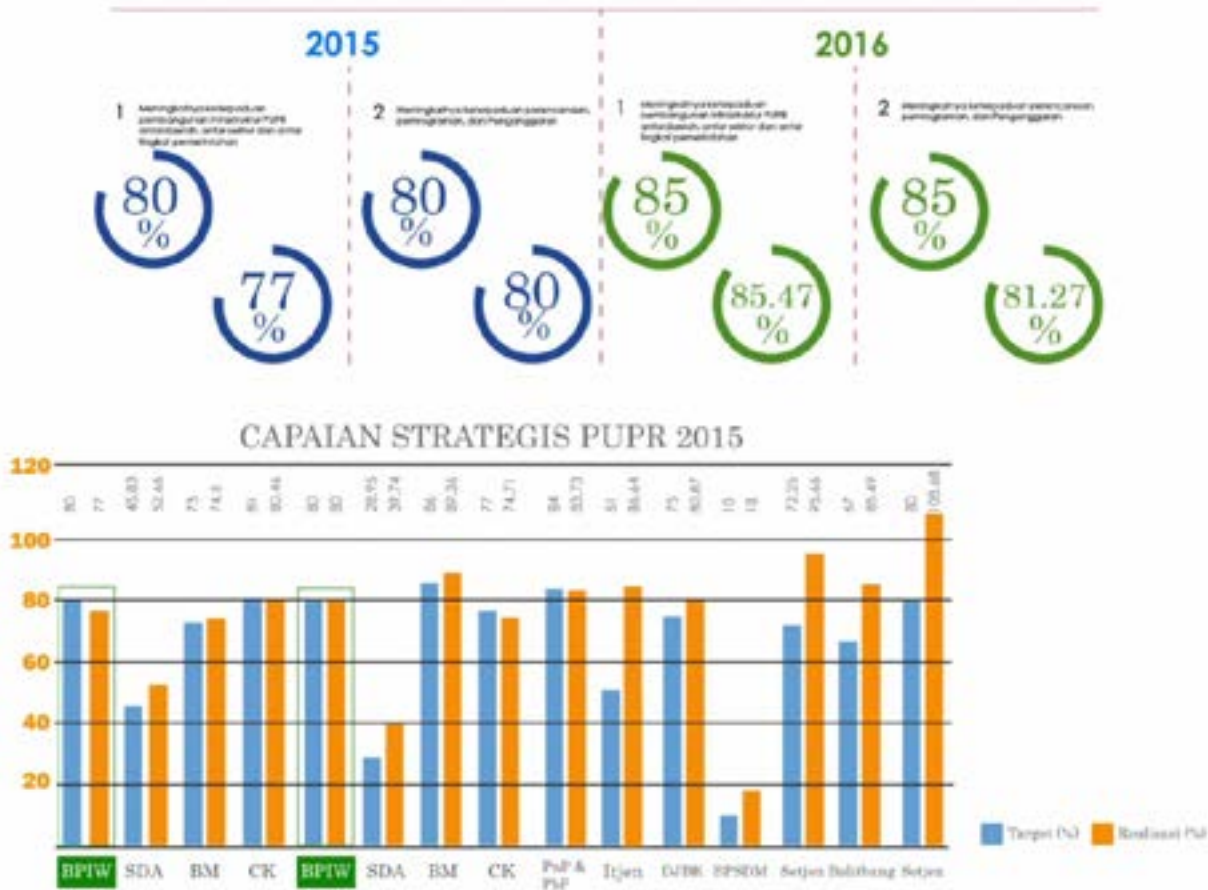


Penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian PUPR

Sumber: Dok. BPIW



Evaluasi Capaian Sasaran Strategis BPIW Tahun 2015 & 2016 (Renstra PUPR)



Untuk mewujudkan perencanaan tersebut dilakukan melalui konektivitas, aksesibilitas antar kawasan pertumbuhan dengan *hinterland*, pertumbuhan ekonomi wilayah dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas hidup, dan keseimbangan antar kawasan.

**4. 12 Masterplan dan Development Plan Kawasan Strategis, salah satunya development plan KPS Danau Toba**

Ke-12 *masterplan* dan *development plan* kawasan strategis ini salah satunya program utama *Development Plan* KPS Danau Toba 2015-2019. Pada tahun 2015, kawasan yang menjadi kawasan strategis yakni Kawasan Cikarang Bekasi Laut (CBL), Danau Toba, *Food Estate* Merauke, dan Magelang-Muntilan-Borobudur. Sedangkan tahun 2016, untuk Kawasan Strategis Pariwisata Pantai yakni Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Wakatobi, Raja Ampat, dan Morotai. Kemudian, Kawasan Strategis Pegunungan dan Budaya yakni Brastagi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Toraja.

**5. 22 Masterplan dan Development Plan Kawasan Perkotaan, serta 8 FS dan Pra Desain Kawasan Perkotaan**

Beberapa *masterplan* dan *development plan* itu

seperti *Master Plan* KPS Metropolitan Mebidangro 2025, *development plan* dari program utama Metropolitan Mebidangro Tahun 2015-2019, dan *Development Plan* KPS Metropolitan Mebidangro Tahun 2015-2019.

Kemudin juga ada Program Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Kawasan Megapolitan Mebidangro, yang merupakan penajaman program, dan Program Arahan KPS Metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) 2018.

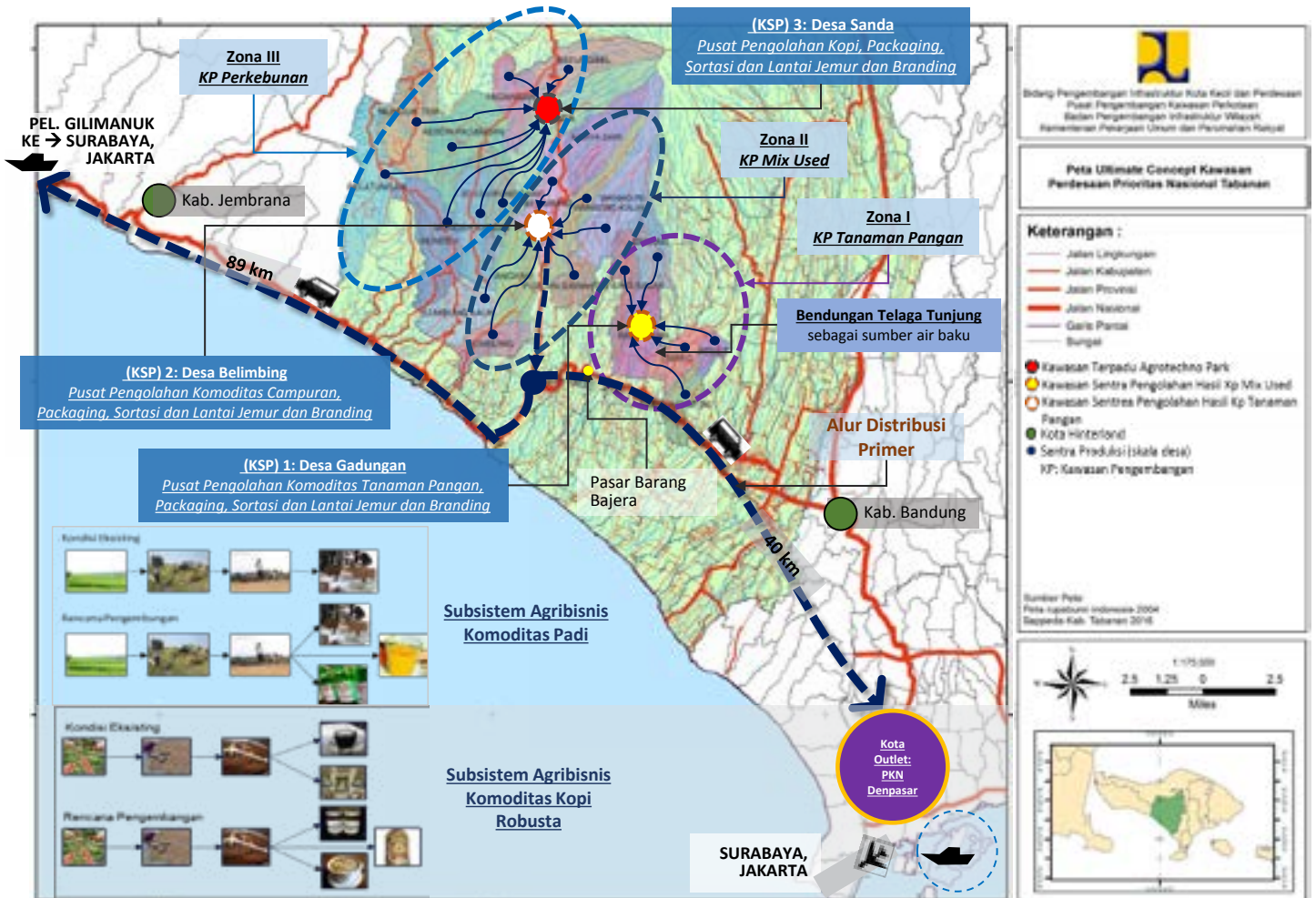
**6. 26 Masterplan dan Development Plan Kawasan Perdesaan Strategis (KPS) dan 14 Masterplan dan Development Plan KPPN**

Dari 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) tersebut, 4 lokasi KPPN dibuat Kementerian PUPR, 8 lokasi dibuat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 2 lokasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keempat *masterplan* dan Pra DED yang disusun BPIW tersebut yakni KPPN Daruba, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan.

Kemudian untuk *Development Plan* dan *Masterplan* Kawasan Perdesaan Strategis (KPS), seperti KPS di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi,

Adapun strategi yang dilakukan dalam melaksanakan *masterplan* dan *development plan* WPS ini yakni memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven*, keterpaduan perencanaan : antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan.

# MASTERPLAN KPPN TABANAN 2018-2028



dan Pulau Nusa Tenggara. Produk tersebut dihasilkan BPIW pada tahun 2015. Kemudian produk yang dihasilkan pada tahun 2016 yakni KPS Kabupaten Trenggalek.

## 7. Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program 35 WPS

Dokumen tersebut untuk program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR untuk jangka waktu 3 tahun dan program tahunan 2015, 2016, 2017, dan 2018.

## 8. Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Total kebutuhan APBN dalam kurun waktu 5 tahun mencapai Rp 789,04 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut untuk pembangunan baru, rehabilitasi dan pelebaran (mayor dan signifikan). Dengan terbatasnya APBN, maka diperlukan sumber-sumber lain, seperti dari APBD dan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Sharing anggaran untuk pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah

ini, dapat terlihat dari Ilustrasi Skema Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan di WPS 7 Jakarta – Bogor – Ciawi – Sukabumi, dimana APBN dari empat Ditjen yakni Cipta Karya, SDA, Bina Marga, dan Penyediaan Perumahan, totalnya mencapai Rp 100,61 triliun. Sedangkan dari APBD diharapkan mencapai Rp 3,17 triliun, dan KPBU mencapai Rp 58,19 triliun.

## 9. 3 Lokasi Penyiapan Proses Loan World Bank untuk Integrated Tourism Master Plan

Integrated Tourism Master Plan akan dibuat untuk 3 destinasi wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Proses penyusunan Integrated Tourism Master Plan tersebut akan dilakukan pada Juli 2017 hingga Mei 2018.

Berdasarkan masterplan dan development plan masing-masing WPS di kawasan tersebut, program dukungan infrastruktur Kementerian PUPR tahun 2017, seperti Pembangunan Jalan Siantar By Pass untuk mendukung KSPN Danau Toba dan penyusunan RTBL Kawasan Candi

Dari 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) tersebut, 4 lokasi dibuat oleh Kementerian PUPR, 8 Lokasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 2 Lokasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mendut Kabupaten Magelang untuk mendukung KSPN Borobudur. Kemudian juga ada program Pembangunan Embung Serbaguna Bangka di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung KSPN Mandalika.

10. Dukungan Sistem Informasi

Dukungan Sistem Informasi ini seperti Sistem Manajemen Pelaksanaan Keterpaduan Program Infrastruktur Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis, Bank Data BPIW, Sistem Informasi Pemrograman, Database Perkotaan, dan Sistem Monitoring Tanah (SIMONAH).

Dapat diinformasikan bahwa SIMONAH Infrastruktur PUPR merupakan sebuah sistem informasi pengadaan tanah berbasis web yang meliputi progress, permasalahan, dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengadaan tanah infrastruktur seluruh Kementerian PUPR.

Terkait 90 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana, BPIW juga melakukan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (Sertifikasi ISO 9001). Untuk sertifikasi ini diraih oleh Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah lingkup Layanan Kesekretariatan : Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Program dan Evaluasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (ISO 9001:2008).

Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR meraih sertifikasi melalui Kebijakan Teknis untuk

Perencanaan Strategis dan Analisis Manfaat, Perencanaan Infrastruktur, Penganggaran dan Umum (ISO 9001:2008). Sertifikasi juga diraih oleh Pusat Pemrograman dan Keterpaduan Infrastruktur PUPR lingkup Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (ISO 9001:2015).

Kemudian sertifikasi diraih Pusat Pengembangan Kawasan Strategis lingkup Layanan Penyediaan Kebijakan Teknis Pengembangan Kawasan Strategis dan Fasilitasi Pengadaan Tanah (ISO 9001:2008).

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan juga mendapat sertifikasi ISO melalui Layanan Penyediaan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan, Kota Besar, Kota Baru serta Keterkaitan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (ISO 9001:2015)

Untuk program BPIW tahun 2017 ini, menurut Rido diarahkan untuk memperkuat, monitoring dan evaluasi terhadap program yang ada. "Kalau dari monitoring dan evaluasi yang sebelumnya, perencanaan memiliki nilai yang bagus. Kemudian terkait pemrograman nilainya cukup tinggi yakni mencapai 90%. Hal itu perlu diperkuat," imbuh Rido. Selain itu juga akan dilakukan kajian mengenai dampak keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di setiap WPS. "Kajiannya seperti berapa dampak keterpaduan itu dari segi ekonomi dan sosial, itu bagian kajian 2017 mendatang," tukasnya.

Tim Redaksi

Integrated Tourism Master Plan akan dibuat untuk 3 destinasi wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Proses penyusunan Integrated Tourism Master Plan tersebut akan dilakukan pada Juli 2017 hingga Mei 2018.

PROGRAM UTAMA 2017 DI 3 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (BERDASARKAN MPDP MASING-MASING WPS)

Kawasan Danau Toba



Kawasan Borobudur



Kawasan Lombok





## Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia

Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia  
 Penerbit : Penerbit ITB Bekerjasama/ dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko  
 Tahun Terbit : 2011  
 Jumlah halaman : 393 halaman

Buku ini adalah kumpulan tulisan dari 18 orang lulusan pendidikan perencanaan wilayah dan kota yang saat ini terlibat dan memiliki kedudukan di berbagai bidang, dalam sektor swasta, publik, maupun yang berada di lembaga legislatif. Mereka berkecimpung dalam berbagai bidang dan tempat kerja dan dengan berbagai pengalaman dan cara pandangnya masing-masing.

Momen 50 tahun perencanaan Wilayah dan Kota ini diambil dari pendirian Bagian Tata Pembangunan Daerah dan Kota di Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1959. Namun demikian, bukan berarti masa-masa sebelumnya tidak ada perencanaan daerah dan kota di Indonesia. Sejak awal abad ke-20 pemikiran untuk penataan dan perencanaan kota sudah dilakukan. Pada tahun 50-an, masalah perencanaan hanya ditangani oleh sekitar 60 orang insinyur yang bekerja di lingkungan Departemen PU di seluruh Indonesia. Jumlah ini dirasa kurang apalagi mengingat Indonesia adalah negara besar dan berbentuk kepulauan. Kemudian muncul usulan dari *Harvard Graduate School of Design* agar Indonesia mendirikan sekolah bidang perencanaan daerah dan kota. Pemerintah menerima usulan tersebut dan akhirnya pada tanggal 14 September 1959 diresmikan sekolah bagian perencanaan daerah dan kota di ITB. Sekarang sudah ribuan sarjana, master dan doktor di bidang perencanaan.

Namun penambahan jumlah rencana masih belum dapat menyaingi perkembangan persoalan perencanaan di tanah air Indonesia mengingat semakin rumitnya permasalahan pembangunan. Bukan hanya karena luas dan bentuk geografis Indonesia sebagai kepulauan, melainkan keberagamannya dari segala segi (fisik, sosial ekonomi, pemerintahan, kepemimpinan, serta permasalahan khusus

yang dihadapi). Belum lagi faktor eksternal misalnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi, perkembangan situasi dalam negeri, dan lain-lain turut menambah rumitnya masalah pembangunan wilayah dan kota di Indonesia.

Tulisan para kontributor dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok Permasalahan Perencanaan di Indonesia
2. Kelompok Tantangan Pembangunan Wilayah dan Kota
3. Kelompok Pendekatan dan Teknik Perencanaan

Sebagai pembuka pada buku ini, diawali dengan tulisan Prof. Budhy Tjahjati S. Soegijoko yang menyampaikan tentang pergeseran konsepsi dan pendekatan dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Ada 4 hal yang diangkat oleh beliau sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan di Indonesia, yaitu: urbanisasi, globalisasi, lokalisasi, dan perubahan di Kawasan Asia. Bagian satu kemudian dilanjutkan dengan tulisan dari Kemal Taruc, Suprayoga Hadi, Suhadi Hadiwinoto, Ridwan Sutriadi, Hari Ganie, dan Saut Sagala, Ouja Handika, dan M. Reza Arisandy.

Pada bagian dua, para penulis menyajikan berbagai tantangan pembangunan sesuai dengan pengalaman dan perhatian masing-masing. Bambang Bintoro dengan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan, birokrasi, dan profesi perencana memaparkan bagaimana kesungguhan pemerintah untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur masih belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Fajar Hadi Mardiansyah melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan Pemda dan Pemkab menghadapi tingkat urbanisasi yang tinggi. Suwardjoko P. Warpani sebagai seorang pemerhati menunjukkan kegelisahannya melihat bagaimana pembangunan (khususnya di Kota Bandung) telah merusak tatanan mapan yang menghilangkan kawasan bersejarah. Deden Rukmana, Djoko S. Abi Suroso, dan Benedictus Kombaitan mengangkat permasalahan perubahan iklim dan kaitannya dengan penataan ruang.

Adapun pada bagian tiga, sekelompok penulis menyampaikan berbagai teknik dan metoda yang diyakini akan meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan. Dalam bagian ini, kontributor yang turut menuangkan buah pikirannya antara lain: Ruchyat Deni Djakapermana mengajukan pendekatan system dinamis, Risfan Munir memadukan beberapa teknik analisis dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian, Tatag Wiranto yang menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan adalah jawaban dari beberapa

permasalahan di bidang ini, Bambang S. Priyohadi meyakini bahwa komunikasi adalah jawaban bagi efektifnya suatu rencana, Elkana Catur Hardiansyah memaparkan tentang pentingnya media sosial dalam mendorong kontribusi dan umpan balik dari masyarakat. Terakhir Delik Hudalah, Ishma F. Soepriadi, dan Louise Desriany yang mengangkat permasalahan peri urban. Bagian akhir buku ditutup kembali oleh Prof Budi Tjahjati yang diberi judul Mencari Visi Baru Perencanaan, dari Paradigma ke Praksis. **(Nutri infobpti)**

**Pertambahan jumlah rencana belum dapat menyaingi perkembangan persoalan perencanaan di Indonesia yang semakin rumit. Oleh karena itu, kumpulan buah pikiran dari para praktisi dan akademisi ini diharapkan dapat menjadi sedikit bagian dari solusi dalam pengembangan wilayah.**



# Istilah Tentang Keterpaduan dan Pertumbuhan

“Keterpaduan” dan “Pertumbuhan” adalah kata kunci yang diemban oleh BPIW sebagai badan perencana di Kementerian PUPR. Bagaimana merencanakan pembangunan agar terpadu, adalah goal utama yang ingin dicapai oleh Kementerian PUPR, agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan pembangunan yang terpadu antasektor, diharapkan outcome yang maksimal akan dapat diraih dan mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Berikut beberapa istilah tentang Keterpaduan dan Pertumbuhan:

**Padu, Keterpaduan:** (1). Terintegrasi, penyatuan dari berbagai bagian dalam satu kesatuan bersama; (2). Untuk menentukan nilai optimasi pelayanan wilayah dan infrastruktur itu sendiri.

**Keterpaduan Infrastruktur:** Pengembangan dan pembangunan

infrastruktur yang utuh, terhubung, kompak satu sama lain (baik wilayah maupun jenis infrastruktur) untuk mendukung tujuan yang sama. Contoh: Keterpaduan infrastruktur irigasi, jalan dan kawasan industri dalam mendukung pengembangan agropolitan di provinsi Gorontalo.

**Keterpaduan Aset:** Kondisi asset yang padu, terhubung dalam satu manajemen terintegrasi.

**Terpadu:** Sudah dipadukan (Disatukan, dilebur jadi satu).

**Tumbuh:** Sedang berkembang (menjadi besar, sempurna, dan sebagainya).

**Pertumbuhan:** Hal (keadaan) tumbuh. **Pertumbuhan Wilayah:** Keadaan suatu wilayah yang tumbuh atau berkembang. **Pertumbuhan penduduk:** Bertambah atau bekurangnya jumlah penduduk dalam suatu daerah.

**Pertumbuhan ekonomi:** (1). Kenaikan produk nasional bruto dalam satu negara; (2) perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat; (3) kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaai ideologis yang diperlukannya.

**Pertumbuhan Pro Kemiskinan:** Konsep yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan memungkinkan masyarakat miskin secara aktif berpartisipasi dan memberikan manfaat dari kegiatan ekonomi.

*Sumber: Kamus Istilah Pengembangan Wilayah Edisi 1*



# Program Pengembangan Wilayah Dipertajam

**Ir. Rido Matari Ichwan, MCP.**

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah*

Pada tahun 2017 ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR terus 'melahirkan' produk-produk perencanaan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Beberapa hal yang akan dilakukan seperti penajaman program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dukungan terhadap 3 Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional atau KSPN, dalam bentuk penyusunan integrated masterplan juga menjadi fokus dari program kerja BPIW. Tiga KSPN tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Berikut penjelasan lebih lanjut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengenai hal itu saat dibincangi Buletin Sinergi, beberapa waktu yang lalu.

### Seperti apa penyusunan program yang dilaksanakan BPIW sepanjang tahun 2017?

Kita terus berupaya menajamkan program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Mulai dari penajaman metodologi penyusunan rencana sampai dengan penyusunan program. Hal ini dilakukan supaya program-program yang kita lakukan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Penajaman dilakukan dengan strategi perencanaan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Kita jalankan penajaman berdasarkan standard operating procedure atau SOP yang ada. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kita menyelesaikan percontohan inkubasi, baik inkubasi pembangunan perkotaan, pembangunan kawasan, maupun pembangunan tempat istirahat untuk para pengguna jalan di jalan nasional yang kita sebut anjungan cerdas. Pada inkubasi tersebut, yang menjadi fokus kita adalah inkubasi pariwisata, terutama di kawasan pariwisata Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kita buat perencanaan, sehingga nantinya langsung dapat dipergunakan unit organisasi atau unor maupun kementerian atau lembaga lainnya.

Hingga akhir tahun 2017, program-program pariwisata yang direncanakan, kita masukkan dalam bagian dari *loan* World Bank. Nantinya biaya pembuatan program tersebut, kita dapat meminta biaya penggantian kepada World Bank, sesuai kriteria yang kita bicarakan dengan World Bank. Jadi tidak harus menunggu *loannya* cair terlebih dahulu. Program-program infrastruktur PUPR tersebut, mesti mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

### Seperti apa seharusnya program-program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung tema dari rencana kerja pemerintah pusat tersebut?

Untuk mendukung tema dari rencana kerja pemerintah pusat, maka program-program

pembangunan infrastruktur PUPR, harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Langkah-langkah yang harus diterapkan, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan *money follow program* yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

### Apa yang Bapak tekankan agar seluruh jajaran pimpinan BPIW dapat melaksanakan kegiatan sepanjang tahun 2017 dengan optimal?

Beberapa hal yang saya tekankan yakni, percepatan penetapan dokumen *review* Rencana Strategis atau Renstra PUPR. Kita menargetkan *review* Renstra dapat selesai bulan Maret. Sedangkan penetapan Renstra BPIW, kita targetkan dapat diselesaikan akhir Januari. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga adalah terkait pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg dan Konsultasi Regional atau Konreg. Kita akan matangkan skema pelaksanaan Pra Konreg dan Konreg agar menjadi aturan baku dalam hal sistem pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.

Tidak hanya itu, masterplan dan development plan juga harus menjadi proses perencanaan yang berbasis pengembangan wilayah dan tidak berupa kompilasi program dari beberapa unit organisasi atau unor.

### Selain itu, apa yang menjadi perhatian Bapak?

Pemantapan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR, saya rasa perlu menjadi perhatian kita. Tidak kalah pentingnya juga bagaimana mensosialisasikan hasil dan metoda pengukuran keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, baik di internal BPIW dan eksternal. Selanjutnya, kita juga harus merumuskan kembali dan memodifikasi pelaksanaan inkubasi. Khusus pengembangan anjungan cerdas, dilakukan melalui

Kita terus berupaya menajamkan program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Mulai dari penajaman metodologi penyusunan rencana sampai dengan penyusunan program. Hal ini dilakukan supaya program-program yang kita lakukan memiliki akuntabilitas yang tinggi.



Pegawai BPIW mengikuti pelatihan "Kepemimpinan Insan BPIW"

Sumber: Dok. BPIW

*delivery* tugas kepada pihak-pihak terkait, dimana BPIW bertugas menyiapkan *masterplan* dan *design* dan Ditjen Cipta Karya melakukan pembangunan fisik. Kemudian untuk Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN dan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS melaksanakan operasionalisasinya.

**BPIW juga sedang menyiapkan program 2018. Seperti apa pelaksanaannya?**

Untuk proses program 2018, saat ini kita sedang melakukan konsinyasi untuk memfinalkan program-program yang belum terlaksana di tahun 2015 dan 2016, untuk dimasukkan ke program 2018. Kemudian juga program yang tidak bisa dibiayai, kita gabungkan programnya. Kita melakukan *review* terhadap program-program tersebut. Saya kira ada 16 ribuan program

yang dievaluasi. Program yang kita himpun terbatas pada masalah pembangunan strategis. Jadi sekitar 40% dari alokasi dana, harus bisa diarahkan menjadi program terintegrasi yang bertematik dan berdaya guna.

**Bagaimana kesiapan sumber daya manusia di BPIW dalam membuat banyak program perencanaan yang strategis?**

Sumber daya manusia atau pegawai yang kita punya sekitar 350 orang, sebagian besar adalah profesional muda. Mereka banyak memberikan masukan untuk mengerjakan sistem yang kita bangun. Kita melakukan diskusi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai muatan-muatan apa yang harus disampaikan ke staf BPIW, agar kinerjanya dapat terus meningkat.

Kita akan matangkan skema pelaksanaan Pra Konreg dan Konreg agar menjadi aturan baku dalam hal sistem pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.



Kemudian staf BPIW harus tahu lapangan dan berinovasi dalam hal membuat program perencanaan. Jadi metodologinya kita perbaiki. Tapi dalam hal pendidikan tidak dipisah-pisahkan, karena harus punya ilmu yang sama, karena ilmu itu menjadi bekal dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Keberadaan pegawai tersebut sangat bermanfaat buat kita semua. Kalau nantinya kontraktual individual menjadi PNS di BPIW, itu baik. Namun bila ditempatkan di tempat lain, dia sudah punya ilmu bagaimana merancang sebuah program.

#### **Apa yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan BPIW selama 2017 ini?**

Kita sangat berharap pembangunan infrastruktur itu bisa meningkatkan nilai tambah baik di kawasan perdesaan, perkotaan, di wilayah timur dan barat Indonesia. Nilai tambah ini bisa di ukur. Kita bisa mengukur *output* dan *outcome*. Namun yang lebih bagus lagi adalah mengukur *impact* dari pembangunan infrastruktur tersebut. Misalnya dengan infrastruktur yang dibangun PUPR, berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum. Namun yang lebih jauh lagi adalah bagaimana mencapai *benefit* dari target pembangunan infrastruktur. Maksudnya adalah bahwa ketika kita membangun infrastruktur di wilayah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan infrastruktur yang tepat, dapat memberi kemajuan ekonomi dan

kemajuan sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian PUPR bisa membuktikan diri bahwa berkontribusi yang diberikan untuk membangun infrastruktur, lebih terukur, itu harapannya.

Kemudian 2018-2019 kita harus berinovasi lagi untuk melakukan pengukuran tersebut sehingga lebih akurat. Misalnya, penyerapan anggaran dengan melakukan berbagai kegiatan, kita harus menilai apakah *outputnya* sudah benar, demikian juga dengan *impact dan benefitnya*.

#### **Bagaimana pula harapan Bapak terhadap perencanaan yang dibuat BPIW selama ini?**

Kita berharap dari perencanaan yang kita buat dapat membuat keseimbangan pembangunan infrastruktur, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Sehingga tidak ada lagi disparitas pembangunan kedua kawasan tersebut. Demikian pula dengan infrastruktur di perdesaan, kondisinya dapat sama baiknya dengan kawasan perkotaan. Bila infrastruktur di perdesaan dikembangkan, maka dapat memproduksi barang yang diperlukan di kota. Selain itu, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Dengan terciptanya lapangan kerja, maka taraf hidup masyarakat dapat lebih meningkat, sehingga dapat mengikis kemiskinan.



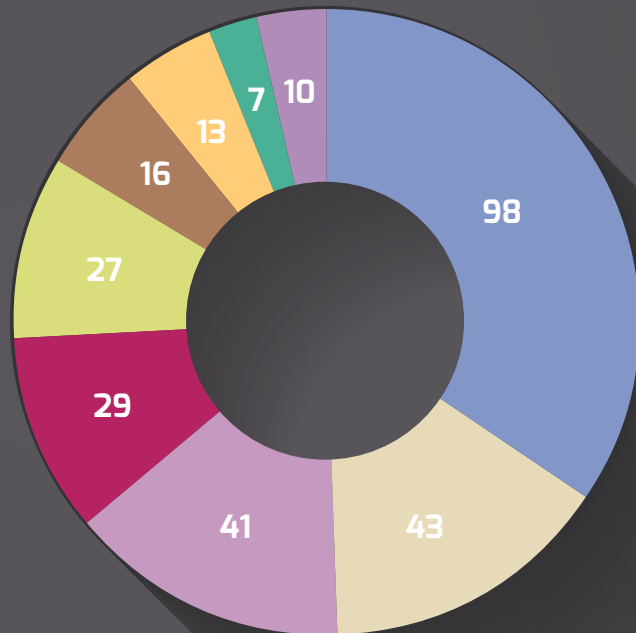
Kita berharap dari perencanaan yang kita buat dapat membuat keseimbangan pembangunan infrastruktur, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Sehingga tidak ada lagi disparitas pembangunan kedua kawasan tersebut.



# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 6 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan. Selama bulan Januari 2017. Total ada 284 berita dari 7 media periode 1 Januari - 31 Januari 2017

1 Pembangunan Jalan/ jalan tol/jembatan	98	
2 pengembangan perkotaan/smart city/ kota pusaka	43	
3 Perumahan/Rusun/Permukiman	41	
4 Pembiayaan infrastruktur/ anggaran	29	
5 Pengelolaan air/ sungai/Bendungan/ sanitasi	27	
6 Pembebasan lahan/pertanahan	16	
7 penataan ruang	13	
8 Pengembangan kawasan pariwisata	7	
9 Lain-lain	10	
Total : 284		



Pemberitaan pada bulan Januari 2017 totalnya mencapai 284 berita. Berita tersebut didominasi oleh pemberitaan mengenai pembangunan jalan, jalan tol serta jembatan yang mencapai 98 berita disusul dengan pemberitaan mengenai pengembangan perkotaan, smartcity serta kota pusaka yang mencapai 43 berita. Kemudian, pemberitaan mengenai perumahan, rusun dan permukiman yang mencapai 41 berita. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah yang menggenjot pembangunan konektivitas, pengembangan dan penataan perkotaan serta pembangunan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).





### **Berita Menarik yang berkaitan dengan pengembangan Infrastruktur PUPR, sepanjang bulan Januari 2017:**

1. **Sabtu, 31 Desember 2016, Media Indonesia** (Halaman, 14), SMI Biayai Proyek Air Minum Rp 840 Miliar. Pemprov Jatim menjadi penanggung jawab proyek yang totalnya mencapai Rp 2,3 triliun
2. **Senin, 2 Januari 2017, Republika,** (Halaman 5) Kementerian PUPR Bersihkan Sungai di Bima dari Sampah. Untuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Bima
3. **Senin, 2 Januari 2017, Koran Tempo** (Halaman, 14), Asian Infrastructure Siap Biayai 3 Proyek Jalan Tol di Sumatera, pembangkit listrik serta perawatan dan operasi waduk
4. **Selasa, 3 Januari 2017, Investor Daily** (Halaman, 6), PUPR Serap Rp 87 T Anggaran 2016. Realisasi anggaran pada tahun 2016
5. **Selasa, 3 Januari 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 8), Investor Dapat Dukungan Pemerintah. Jalan tol Serang-Panimban segera dibangun
6. **Rabu, 4 Januari 2017, Media Indonesia** (Halaman, 24) Biaya Lampu Jalan Rp 1,8 Miliar. Masalah pembebasan lahan masih menjadi persoalan
7. **Kamis, 5 Januari 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 27), Skema KPBU Perumahan Dikaji. Dalam merealisasikan rencana skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam program perumahan
8. **Minggu, 8 Januari 2017, Kompas** (Halaman, 2), Hunian Vertikal Menjamur di Pinggir Kota. Hunian vertical mulai marak dibangun di pinggiran kota
9. **Selasa, 10 Januari 2017, Investor Daily** (Halaman, 22), PUPR Jamin Rusun Atlet Sesuai Standar OCA. Kementerian PUPR menjamin fasilitas pendukung di Rusun Atlet Asian Games XVIII sesuai standar Olympic Council of Asia (OCA)
10. **Selasa, 24 Januari 2017, Investor Daily** (Halaman 22). Tren Hunian Bergeser ke Barat dan Timur Jakarta. Tren Hunian masa depan diprediksi berkembang ke arah barat dan timur kawasan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi-Cianjur atau khususnya pada kawasan Tangerang – Maja dan Bekasi-Karawang

# Kementerian PUPR Dorong Kedaulatan Pangan Nasional



Kepala BPIW, Rido Matari menjelaskan dukungan PUPR terhadap kedaulatan pangan nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Program Kementerian PUPR pada 2015-2019 dalam infrastruktur yang menunjang kedaulatan pangan, antara lain pembangunan 65 bendungan, pembangunan 1 juta hektar (Ha) irigasi baru, 3 juta Ha rehabilitasi irigasi

serta pembangunan embung-embung untuk pengadaan air baku.

"Selain itu, ada juga berbagai program pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai atau pembangunan kanal banjir," papar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam sesi

*Inspiring Performax* di studio Berita Satu TV yang mengangkat tema "Membangun Infrastruktur Pangan", Jakarta, Rabu (11/1). Pada sesi *Inspiring Performax* tersebut hadir juga nara sumber lainnya, yakni pelaku usaha hortikultura yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex 2017, Rifda Ammarina.

Rido menerangkan, saat ini bendungan yang telah selesai dibangun mencapai 8 bendungan dari target pembangunan 65 bendungan. Adapun pembangunan yang masih berjalan mencapai 24. Untuk pembangunan bendungan lainnya akan mulai dibangun pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Ia mengatakan, hakikat pembangunan infrastruktur PUPR tersebut untuk menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan sektor pertanian. “Dalam pengelolaan pertanian atau pangan, senantiasa

infrastruktur yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

“Dalam pengelolaan pertanian atau pangan, senantiasa membutuhkan air, agar tanaman dapat tumbuh di tanah yang subur,” terangnya.

Saat ini seluruh wilayah di tanah air terkelompok pada 35 WPS. “Dalam setiap

keberadaan infrastruktur sangat strategis dalam mendukung kedaulatan pangan.

“Mulai dari proses menanam hingga distribusi hasil panen,” terangnya.

Rifda menilai, untuk rencana pengembangan infrastruktur dan wilayah yang diterapkan Kementerian PUPR saat ini membuat pelaku sektor pertanian dapat bernafas lega. “Semoga saja program-program tersebut terimplementasikan dengan baik,

sehingga mampu mengangkat produktifitas pertanian,” jelasnya.

Ia yakin, banyak program yang digulirkan kementerian dan lembaga untuk mendorong kemajuan sektor pertanian atau pangan. Namun, lanjut Rifda, banyak petani atau pelaku usaha hortikultura yang tak mengetahuinya. “Padahal kalau program tersebut diketahui serta para pemangku kepentingan sektor pertanian dan hortikultura dapat mengaksesnya dengan baik, akan mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di negeri ini,” terangnya. Untuk itu, lanjutnya, pada 31 Maret-2 April mendatang akan digelar Agrinex 2017. Agrinex 2017 merupakan program edukasi, sosialisasi dan promosi terkait sektor pertanian. Edukasi ditunjukkan kepada masyarakat luas yang ingin tahu banyak hal terkait pertanian. “Sosialisasi ditujukan bagi berbagai lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki program dukungan terhadap sektor pertanian,” ungkap Rifda.

Adapun promosi ditujukan bagi pelaku usaha di bidang pertanian atau pangan untuk mempromosikan produknya lewat Agrinex. Ia berharap, acara tersebut dapat mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan secara nasional. **(ris/infoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

membutuhkan air, agar tanaman dapat tumbuh di tanah yang subur,” terangnya. Di samping itu, lanjut Rido, Kementerian PUPR juga melakukan pengembangan jalan, jembatan, serta halte agro untuk mendukung kemajuan sektor pertanian. Menurutnya, saat ini Kementerian PUPR menerapkan metode pengembangan

WPS posisi jalan menjadi backbone (tulang punggung, -red) bagi pengembangan wilayah. Sehingga, pembangunan infrastruktur PUPR senantiasa direncanakan terpadu dan terkoneksi antar kawasan,” tutur Rido.

Sementara itu, pelaku usaha pangan yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex 2017, Rifda Ammarina mengatakan,

# BPIW - BPOPKP Danau Toba Koordinasi Terkait *Integrated Tourism Masterplan*

## INDIKASI CAKUPAN DESTINASI PARIWISATA DANAU TOBA DAN SEKITARNYA



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BPOPKP) Danau Toba terkait penyusunan *Integrated Tourism*

Rido mengatakan, saat ini penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba, Borobudur dan Lombok sudah memasuki penyelesaian tahap akhir *term of reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) semua kawasan.

*Masterplan* Danau Toba, Borobudur dan Lombok di ruang rapat utama BPIW, Jakarta, Kamis (19/1).

Koordinasi tersebut dihadiri langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan didampingi jajarannya dan Kepala BPOPKP Danau Toba, Aries Prasetyo.

Rido mengatakan, saat ini penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba, Borobudur dan Lombok sudah memasuki penyelesaian tahap akhir *term of reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) semua kawasan.

Setelah penyelesaian TOR tuntas, lanjut Rido, kemudian BPIW melalui Kementerian PUPR akan memasukan pada proses lelang. "Untuk proses



Sumber: Dok. BPIW

lelang akan dilakukan di LPSE LKPP (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, -red),” terangnya.

Lebih lanjut, Rido menerangkan, lingkup dalam *Integrated Tourism Masterplan* untuk Danau Toba yaitu rencana induk pengembangan infrastruktur di luar lokasi destinasinya. “Seperti pengembangan jalan dari Siantar ke Prapat atau pengembangan jalan tol menuju Danau Toba dan lainnya,” terang Rido.

Selain itu, Rido menjelaskan, *Integrated Tourism Masterplan* untuk Borobudur terkait kawasan-kawasan di sekitar Borobudur. “Adapun untuk Mandalika lingkungannya adalah kawasan-kawasan di Pulau Lombok,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Aries Prasetyo menerangkan, tingkat harapan masyarakat pada program pemerintah

dalam pengembangan Danau Toba sangat tinggi. “Untuk itu saya merasa perlu melakukan banyak koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPIW agar *masterplan* untuk kawasan Danau dapat implikatif sesuai harapan masyarakat,” terangnya.

## BPOPKP Danau Toba berkomitmen melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak supaya dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Danau Toba.

Menurut Aries, pada berbagai pertemuan yang dilakukan terkait pengembangan Danau Toba senantiasa banyak aspirasi masyarakat yang membangun. “Saya di kantor kerap mendapat usulan-usulan dalam bentuk

paper yang tebal. Ekspektasi masyarakat dari 7 kabupaten di sekitar destinasi Danau Toba memang sangat tinggi,” terangnya.

Dengan begitu, lanjutnya, BPOPKP Danau Toba berkomitmen melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak supaya dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Danau Toba. **(ris/infoBPIW)**

# Penajaman Program Pengembangan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah tahun 2018 Infrastruktur PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menajamkan program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat memberikan arahan dan membuka acara Konsinyasi Penyusunan Program Arahan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2018 di Tangerang, Selasa (24/2).

Acara yang digelar Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, dihadiri Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana serta seluruh kepala pusat dan perwakilan unit kerja di lingkungan BPIW, Kementerian PUPR.

Rido menjelaskan, program-program infrastruktur PUPR 2018 mesti mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

Untuk mendukung tema pemerintah tersebut, lanjutnya, program-program yang diterapkan Kementerian PUPR mendatang harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.

“Dengan langkah-langkah yang diterapkan, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur,” terang Rido.

Selain itu, lanjut Rido, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. “Dalam melakukan langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan money follow program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial,” paparnya.

Di tempat yang sama, Pusat





Rido Matori saat memberikan arahan dan membuka acara Konsinyasi Penyusunan Program Arahannya Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2018

Sumber: Dok. BPIW

Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris Batubara menerangkan, kriteria prioritas program yang akan disusun BPIW untuk tahun anggaran 2018 yakni, Pertama, dukungan infrastruktur untuk kawasan perbatasan dan tertinggal.

“Pada kawasan perbatasan yang diprioritaskan adalah kawasan yang berbatasan langsung, yakni di 5 lokasi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, Papua,-red) dan kawasan yang tidak berbatasan langsung (pulau-pulau terluar,-red),” papar Harris.

Selain itu, lanjutnya, lokasi prioritas daerah tertinggal 122 kabupaten tertinggal. “Untuk 2018 prioritasnya 80 kabupten,” terang Harris.

Kedua, dukungan infrastruktur untuk industri pengolahan. “Prioritasnya pada kawasan dengan potensi tinggi, seperti KI (kawasan industri,-red) Morowali, KI

Bantaeng, KI Sei Mangke, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, KEK Bitung, KEK Maloy-Batuta-Trans-Kalimantan, KI Buli, KI Bitung, KI Palu,” paparnya. Selain itu, KI Gresik/Pasuruan, KI Dumai, KI Serang, KI

## Program-program yang diterapkan Kementerian PUPR mendatang harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.

Berau, KI Tanjung Buton, KI Tanah Kuning)

Ketiga, dukungan infrastruktur untuk jasa pariwisata. Yakni, untuk 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika. “Ada 2 lokasi KEK

Pariwisata Tanjung Kelayang dan Morotai,” terangnya. Ada juga untuk 6 KSPN lainnya yakni Kepulauan Seribu, Bromo Semeru Tengger, Tanjung Lesung, Wakatobi, Labuan Bajo, Mandeh

Empat, kawasan strategis yang didukung oleh rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni KEK Maluku di WPS 30.

Lima, ungkap Harris, prioritas pada kawasan yang belum mendapat penanganan khusus, namun tetap perlu mendapat dukungan. “Seperti Jambi: Kerinci, Bali: Bali Utara-Bali Barat, Bengkulu: Enggano, Kepulauan Riau: Batam-Bintan, Kalimantan Tengah: Tanjung Putting, Gorontalo: PKN Gorontalo, Sulawesi Barat: PKN Mamuju,” terangnya.

la menjelaskan, dalam tahap berikutnya urutan prioritas tersebut akan dicermati sesuai tingkat kesiapannya pada masing-masing proyek prioritas. **(ris/infoBPIW)**

# Kementerian PUPR-Unesco IHE Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan Bidang Pengairan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan melakukan peninjauan peluang kerja sama dengan Unesco IHE, yakni lembaga pendidikan pascasarjana bidang pengairan internasional yang berbasis di Delft, Belanda.

Rencana peninjauan kerja sama tersebut terungkap saat

Direktur Bisnis Unesco IHE, Johan A. Van Dijk dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke kantor BPIW, Jakarta,

Senin (23/1). Kunjungan perwakilan Unesco IHE tersebut disambut langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan didampingi jajaran pejabat BPIW.

Rido menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR melalui BPIW menggunakan metode pendekatan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

dalam mewujudkan sasaran strategis pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Rencana peninjauan kerja sama tersebut terungkap saat Direktur Bisnis Unesco IHE, Johan A. Van Dijk dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke kantor BPIW



“Seluruh wilayah Indonesia masuk ke dalam 35 WPS,” terangnya. Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan industri, kawasan wisata, kota baru publik, kawasan

lumbung pangan dan lainnya.

Untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan sasaran strategis pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, lanjut Rido, Kementerian PUPR senantiasa terbuka untuk melakukan penajakan peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

“Seperti melakukan kerja sama dengan World Bank dalam pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,-red), khususnya untuk KSPN Danau Toba, Borobudur dan Mandalika,” terangnya.

Selain itu, lanjut Rido, ada juga kerja

mendalam, guna mengambil langkah berikutnya.

---

**Johan A. Van Dijk mengatakan, kunjungan ke BPIW untuk dapat melakukan penajakan berbagai peluang kerja sama, seperti pendidikan pengairan, pengembangan data *science, system engineering*, praktek terbaik dalam manajemen proyek dan lainnya.**

---

Di tempat sama, Johan A. Van Dijk mengatakan, kunjungan ke BPIW untuk dapat melakukan penajakan berbagai

berpengalaman melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dunia internasional. Johan menyatakan, pihaknya tertarik untuk melakukan kerja sama di Indonesia karena banyak hal yang dapat dikembangkan secara bersama-sama. **(ris/infoBPIW)**



sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Belanda dalam mengatasi banjir rob di Semarang, Jawa Tengah. Menurut Rido, berbagai peluang kerja sama akan dikaji jajaran BPIW secara

peluang kerja sama, seperti pendidikan pengairan, pengembangan data *science, system engineering*, praktek terbaik dalam manajemen proyek dan lainnya. Ia mengakui, pihaknya telah

Sumber: Dok. BPIW

# ***Kepala BPIW: Tren Hunian Masa Depan di Barat dan Timur Kawasan Jabodetabekjur***



Pembangunan rumah susun di Kemayoran.

---

Pada 2018-2019, ungkap Rido, jalan tol yang menghubungkan Pamulang-Cinere-Depok-Jagorawi-Cibitung akan beroperasi. Selain itu, ada juga rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan TB Simatupang-Kabupaten Bogor.

---

Tren hunian masa depan diprediksi akan berkembang ke arah Barat dan Timur kawasan Metropolitan Jakarta-Depok-Bogor-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Tepatnya, pada kawasan Tangerang-Maja dan Bekasi-Karawang. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matori Ichwan saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya, Jakarta, (14/1).

Menurut Rido, pada tahun 2018 dan 2019 berbagai proyek infrastruktur strategis di Jakarta akan selesai dibangun. Seperti dua transportasi masal Ibu Kota dengan sistem *Transit Oriented Development* (TOD) yakni *Light Rapid Transit* (LRT) dan *Mass Rapid Transit* (MRT) tahap I yang menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.

“Kemudian studi kelayakan tahap II sudah selesai dilakukan. Proyek tahap II akan mulai dibangun sebelum proyek tahap I beroperasi.



Sumber: Dok. BPIW

Target proyek tahap II beroperasi tahun 2020. Akan ada juga tambahan MRT dan LRT yang menghubungkan ke arah Barat dan Timur,” ujar Rido.

Pada 2018-2019, ungkap Rido, jalan tol yang menghubungkan Pamulang-Cinere-Depok-Jagorawi-Cibitung akan beroperasi. Selain itu, ada juga rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan TB Simatupang-Kabupaten Bogor.

Hadirnya berbagai infrastruktur transportasi masal tersebut akan membuat waktu tempuh ke Jakarta semakin pendek. Sehingga, beberapa tahun ke depan masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan merasa nyaman memiliki rumah di kawasan Maja atau Karawang meskipun aktivitas kerja di Jakarta.

“Hal ini tentunya menjadi peluang bagi para pengembang untuk mengambil manfaat

dengan membangun hunian berimbang di kawasan luar Jakarta (Maja-Karawang,-red). Ke depan masyarakat akan dengan senang hati memiliki rumah di wilayah tersebut,” papar Rido.

Selain itu, lanjut Rido, para pengembang

**Menurut Rido, berkembangnya wilayah bagian Barat dan Timur dari Kawasan Metropolitan Jabodetabekjur telah sesuai dengan tata ruang Jabodetabekjur yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2008.**

juga memiliki peluang untuk membangun hunian-hunian vertikal di pusat Jakarta. Terlebih, kondisi di ibu kota lahan semakin mengecil, aturan semakin ketat, sehingga pembangunan hunian vertikal merupakan solusi utama untuk dikembangkan.

Menurut Rido, berkembangnya wilayah bagian Barat dan Timur dari Kawasan Metropolitan Jabodetabekjur telah sesuai dengan tata ruang Jabodetabekjur yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2008.

Dalam mengawal perkembangan bagian Barat dan Timur tersebut, ungkap Rido, BPIW Kementerian PUPR akan mendorong agar perkembangannya berjalan dalam koridor konsep kota modern, yakni *Smart Sustainable City* (Kota Cerdas Berkelanjutan). “Iya *Sustainable* dengan infrastruktur yang kita bangun, kota berjalan secara berkelanjutan, sampah terkelola,

air minum tersedia, sanitasi tersedia dengan baik, aksesibilitas terjalain baik. Artinya, kota tersebut dapat nyaman dihuni dalam kurun waktu yang lama,” tegasnya. **(ris/BPIW)**

# Kementerian PUPR Dukung Pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur.

“Dukungan infrastruktur PUPR guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di KSPN tersebut (Bromo-Tengger-Semeru,-red), pada tahun 2017 ini akan ada penataan bangunan kawasan mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan,” papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Infrastruktur Pengembangan Destinasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang



Kemaritiman di Jakarta, Senin (23/1). Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono ini, hadir juga perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata serta perwakilan Pemerintah Kabupaten-Kota se Jawa Timur.

Rido mengatakan, ada juga rencana melaksanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Malang. “Kemudian pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Malang,” paparnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga penyusunan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Sukapura,

Kabupaten Probolinggo. Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 1000 Ha di Molek, Kabupaten Malang serta lanjutan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder 700 Ha di Kedung Kandang di Kabupaten Malang.

“Selain itu tahun ini ada pembangunan jaringan pipa transmisi air baku 0,035 m<sup>3</sup>/det wilayah barat dan intake Sukapura di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Lebih lanjut Rido menuturkan, untuk jalan ada pemeliharaan rutin Jalan



Gempol-Bangil-Pasuruan-Probolinggo. “Kemudian rehabilitasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen. Selain itu, rehabilitasi Jalan Probolinggo-Paiton-Situbondo,” ujar Rido.

Tak hanya itu, ada juga rekonstruksi Jalan Gempol-Bangil-Pasuruan-Probolinggo serta pemeliharaan

rutin batas Kabupaten Malang-Kota Lumajang

Untuk perumahan, lanjut Rido, ada bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum di Kabupaten Malang. “Serta ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Malang,” paparnya.

Dalam rangka konektivitas dengan KPSN Bromo-Tengger-Semeru, Rido menerangkan, akan ada pengembangan Bandara Juanda Abdulrachman Saleh. “Kemudian angkutan kereta api Bandung-Surabaya, Jakarta-Surabaya, Semarang-Surabaya, Jakarta-Malang, Jogjakarta-Malang serta Jakarta-Kediri,” jelas Rido.

Untuk pelabuhan, ada Tanjung Perak, Gresik, Tanjung Wangi, Tanjung Tembaga, Panarukan dan Brondong. “Serta ada juga Jalan Tol Surabaya-Porong, Surabaya-Gresik, Waru-Juanda, Kertosono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto serta Gempol-Pandaan,” tegasnya.

Rido berharap, adanya rencana sejumlah peningkatan infrastruktur di kawasan penopang KPSN Bromo-Tengger-Semeru akan mencapai target kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Soalnya, keberadaan infrastruktur PUPR akan semakin memberikan kemudahan dalam melakukan kunjungan ke KPSN Bromo-Tengger-Semeru. “Termasuk mobilisasi logistik yang pada akhirnya akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas,” harap Rido.

Di tempat yang sama, Agung Kuswandono menerangkan, pada rapat koordinasi ini Kementerian PUPR diberi kesempatan untuk memaparkan rencana aksi dukungannya pada tahun 2017 dengan dihadiri langsung perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

## Dalam rangka konektivitas dengan KPSN Bromo-Tengger-Semeru, Rido menerangkan, akan ada pengembangan Bandara Juanda Abdulrachman Saleh.

“Harapannya pemerintah daerah di sekitar kawasan KSPN Bromo-Tengger-Semeru dapat mengetahui persis rencana pemerintah pusat, sehingga pemerintah di daerah dapat menyiapkan diri dan melakukan langkah-langkah demi terciptanya percepatan dalam pengembangan KSPN tersebut,” ujar Agung. **(ris/BPIW)**

# BPIW Lakukan Rapat Koordinasi Persiapan *Integrated Masterplan for Priority Destination*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan *Integrated Masterplan for Priority Destination* Danau Toba, Borobudur, dan Lombok di Jakarta, Kamis (27/1).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Keuangan, dan Badan Otorita Danau Toba, serta Bank Dunia.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan, pemaparan Term of Reference (TOR) *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba, Borobudur, dan Lombok dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menyampaikan Persiapan

semua pihak pemangku kepentingan.

Rido menerangkan, pinjaman Bank Dunia diharapkan dapat efektif pada tahun 2018. Walaupun begitu, Kementerian PUPR tetap memberikan dukungan untuk 3 destinasi pariwisata pada tahun 2017. Untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dukungan infrastruktur PUPR yang diberikan mencakup 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yakni, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten



Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir. "Antara lain, seperti pelebaran Jalan Ujung Aji-Batas Kota Kabanjahe, pelebaran Jalan Tol Medan-Kualanamu, preservasi dan pelebaran Jalan Siborongborong Tarutung-Batas Kota P. Sidempuan," terangnya. Ada juga pembangunan sanitasi masyarakat di Kabupaten Karo. Pembangunan bendung dan jaringan daerah irigasi (DI) Sidilanitano, Kabupaten Tapanuli Utara. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Hutapaung Parmiahian Tahap I, Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk pembangunan pemeliharaan DI Sihorahora dan lainnya.

Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang dan lainnya. Rido menerangkan, untuk KSPN Mandalika

BPIW masih menerima masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan sebelum dilakukan finalisasi TOR *Integrated Tourism Masterplan*.

Rido menerangkan, pinjaman Bank Dunia diharapkan dapat efektif pada tahun 2018. Walaupun begitu, Kementerian PUPR tetap memberikan dukungan untuk 3 destinasi pariwisata pada tahun 2017.

pengembangan infrastruktur melingkupi menyeluruh di Pulau Lombok. Seperti yang ada rencana rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi (DI) Remeneng Kompleks

"Ya kita harapkan, seminggu setelah paparan ini TOR tersebut dapat menjadi dokumen untuk diproses tahap berikutnya," terang Hadi. Di tempat yang sama, *Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness*, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengakui, rancangan TOR yang telah dipaparkan BPIW sudah bagus. "Sepertinya tinggal mengakomodir sedikit masukan, pada prinsipnya rancangan yang ada telah lengkap," terangnya. (ris/infoBPIW)



Penyusunan *Integrated Masterplan for Priority Destination Borobudur, dan Lombok*

Sumber: Dok BPIW

Untuk KSPN Borobudur, lanjutnya, ada rencana pengembangan di kawasan sekitar Borobudur seperti pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan anak-anak sungainya di Kulon Progo. "Ada juga pemeliharaan rutin Jalan Secang-batas Kota Magelang, Penyusunan RTBL (Tata Bangunan dan Lingkungan,-red) Kawasan Candi Mendut di Kabupaten Magelang," terangnya. Ada juga, lanjut Rido, penyusunan RTBL

Kabupaten Lombok, rehabilitasi jaringan irigasi DI Tanggik Kompleks Kabupaten Lombok Timur, pembangunan embung serbaguna Bangka Kabupaten Lombok Tengah dan lain-lain. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, TOR *Integrated Tourism MasterPlan* Danau Toba, Borobudur, dan Lombok akan terus disempurnakan, dan

# Dukung Akses Jalan Dari Bandara Baru Kulon Progo ke Borobudur, BPIW Lakukan Survei Lapangan



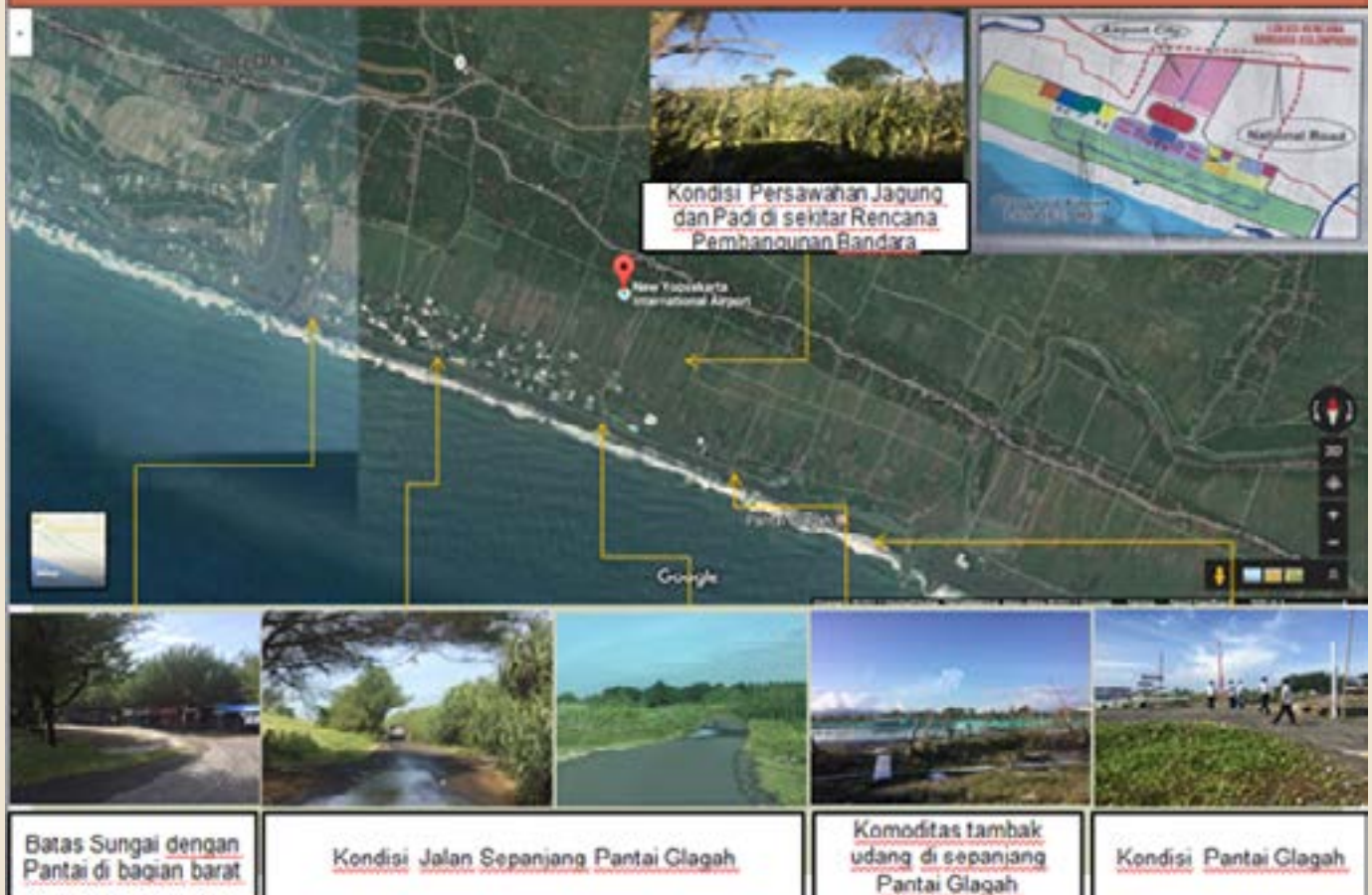
Sumber: Shutterstock

Untuk menentukan alternatif akses jalan yang dapat dijadikan pilihan untuk dikembangkan dalam menghubungkan bandara baru di Kulon Progo dengan kawasan pariwisata Borobudur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan survei lapangan. Kepala Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan dengan adanya akses langsung dari bandara ke Borobudur, diharapkan dapat mendukung destinasi wisata di kawasan itu. "Akses jalan menuju kawasan pariwisata ini menjadi strategis dalam mempercepat pengembangan

pariwisata. Apalagi Borobudur merupakan 1 dari 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yang difokuskan pengembangannya oleh pemerintah," ujar Rido, Kamis (12/1). Saat ini menurut Rido, BPIW sedang menyiapkan Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Masterplan) di tiga kawasan pariwisata

## KONDISI EKSISTING RENCANA BANDARA KULONPROGO DSK



itu, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Penyusunan masterplan ini diperlukan agar rencana pengembangan kawasan tersebut terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Rido pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tetap berbasis pada pengembangan wilayah. Apalagi 3 kawasan wisata itu masuk kedalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Untuk Program Utama KPS Borobudur 2017 yakni Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Progo dan Anak-Anak Sungainya. Pembangunan infrastuktur tersebut dibangun melalui

Ditjen Sumber Daya Air. Kemudian, melalui Ditjen Bina Marga beberapa infrastruktur akan direalisasikan seperti Pemeliharaan Rutin Secang-bts. Kota Magelang, Pemeliharaan Rutin

Selanjutnya itu Ditjen Penyediaan Perumahan akan membangun Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Magelang sebanyak 1069 unit. Selain itu akan dibangun Rumah Swadaya Kabupaten Magelang sebanyak 1069 unit. Kemudian melalui Ditjen Cipta Karya akan dilakukan Penyusunan Rtbl Kws. Candi Pawon untuk KSPN Borobudur, Penyusunan Rtbl Kws. Candi Mendut dan Sanimas Kab. Magelang. **Hen/infobpiw**

**Menurut Rido pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tetap berbasis pada pengembangan wilayah. Apalagi 3 kawasan wisata itu masuk kedalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).**

Keprekan-Borobudur, dan Pemeliharaan Rutin Jln. SoekarnoHatta (Magelang). Selain itu akan dibangun Pemeliharaan Rutin Bts. Kota Magelang-Keprekan, dan Pemeliharaan Rutin Keprekan-Bts. Kota Muntilan.

# Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR Sudah Pertimbangkan Aspek Lingkungan Hidup

Undang-undang (UU) No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan program. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan tugas BPIW sebagai unit organisasi memiliki concern dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR, maka tentunya penyusunan rencana dalam bentuk masterplan, development plan, rencana strategis, rencana induk pulau/ kepulauan, serta program pembangunan infrastruktur PUPR perlu dilengkapi dengan dokumen KLHS sebagai indikator adanya pertimbangan aspek lingkungan dalam

penyusunan rencana dan program yang dilakukan oleh BPIW.

Muatan KLHS sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, antara lain : (1), Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (2), perkiraan dampak dari resiko lingkungan hidup, (3) kinerja layanan atau jasa ekosistem, (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menuturkan bahwa aspek lingkungan hidup telah menjadi pertimbangan dalam penyusunan, perencanaan dan program pengembangan infrastruktur PUPR. Hal itu dilakukan agar pembangunan infrastruktur PUPR benar-benar dapat terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam

penyusunan masterplan dan development Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) maupun kawasan perkotaan dan perdesaan telah disertai dengan analisis terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta analisis-analisis lainnya yang terkait dengan perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi bencana, serta penyelamatan terhadap keanekaragaman hayati

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan (KLHK), Laksmi Wijayanti ke kantor BPIW di Jakarta, Kamis (26/1). Dalam diskusi tersebut mengemuka pentingnya peraturan dan kebijakan yang disusun dapat menyesuaikan dengan isu-isu lingkungan hidup dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berjalan dengan sangat dinamis.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, KLHK,



Sumber: Dok. BPIW

Laksmi Wijayanti mengungkapkan, perlunya mengadopsi green infrastructure dalam pembangunan infrastruktur khususnya di sektor PUPR. Penerapan konsep ini ditujukan agar adanya infrastruktur tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang saat ini sudah semakin memprihatinkan. Seringkali para pengambil kebijakan tidak memikirkan kondisi di masa transisi antara pembangunan infrastruktur dan periode pemulihan lingkungan pasca pembangunan. KLHK saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang instrument ekonomi lingkungan sebagai turunan dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen ekonomi lingkungan mencakup, (1) Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi, (2) Pendanaan dan (3) Intensif dan distributif. Instrumen ini dikembangkan agar dalam

konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan ada pengaturan dalam kompensasi maupun jaminan terhadap para pengembangan maupun pemda. Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana

## Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidaklah berarti merusak lingkungan hidup. Di Negara-negara maju reklamasi juga dikembangkan sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan.

menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidaklah berarti merusak lingkungan hidup. Di Negara-negara maju reklamasi juga dikembangkan sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan. Adanya

pembangunan Infrastruktur justru agar kemudian lingkungan kita lebih tertata dan sustainable.

Beliau menambahkan, KLHK perlu adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

Selama ini sektor kehutanan terlalu terpaku pada kewenangan penetapan kawasan hutan yang seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Kepala BPIW juga menyampaikan perlunya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sektor lingkungan hidup dan kehutanan kepada para perencana di lingkungan BPIW.

Sosialisasi tersebut juga dapat dikemas dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi ahli lingkungan yang tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas pegawai BPIW. Hal ini sejalan dengan adanya standar kompetensi yang diamatkan dalam PP Nomor 46 tahun 2016 terhadap para penyusun KLHS. (\*\*)



# Aplikasi Simonah Kementerian PUPR, Inovasi Solusi dalam Data Pengadaan Tanah

*Kebutuhan terhadap tanah menjadi hal pokok dalam pengembangan infrastruktur. Hal itu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai institusi pemerintah yang bertugas membangun infrastruktur dasar melakukan berbagai inovasi dalam pengadaan tanah. Salah satunya menciptakan dukungan informasi dengan sistem aplikasi data pengadaan tanah, harapannya agar Kementerian PUPR dapat kemudahan saat membuat kebijakan teknis, perencanaan, serta program pengadaan dan pencadangan tanah yang efektif dan efisien dalam menunjang percepatan pengembangan infrastruktur.*

Tantangan dalam pengadaan tanah yang sering terjadi, misalnya, pemilik yang tidak memiliki surat keterangan resmi, dan ketidaksiapan masyarakat menyerahkan tanahnya. Selain itu, ada juga dokumen perencanaan yang belum sejalan dengan standar operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait rincian luas lahan, administrasi di lingkungan pemerintahan daerah yang membutuhkan proses waktu yang tak singkat, nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau terbatasnya tenaga pengukur tanah.

Beragam tantangan saat proses pengadaan tanah, membuat Kementerian PUPR terus berupaya menjawab tantangan yang ada. Saat ini Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menciptakan dan mengembangkan aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (Simonah).

Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, I Gde Wayan Samsi Gunarta menuturkan, dalam upaya menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif serta tepat waktu memang memerlukan sistem informasi manajemen pengelolaan

tanah berbasis website.

Hadirnya aplikasi Simonah telah memberikan informasi tentang tanah yang tidak lagi tumpang tindih, dapat diakses serta dapat dilihat oleh seluruh insan Kementerian PUPR baik pusat maupun di daerah. Simonah saat ini telah terintegrasi dengan e-monitoring Kementerian PUPR. Sehingga, melalui aplikasi tersebut penyajian data secara

komprehensif dan tertib diharapkan dapat terwujud.

Diharapkan unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR dan institusi pemerintah lain yang ada di pemerintah pusat maupun daerah dapat menggunakan aplikasi tersebut. "Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, sehingga tak akan terjadi tumpang tindih data," paparnya.

Menurutnya, Simonah lahir dilatarbelakangi adanya kebutuhan terhadap perangkat yang memberikan kemudahan dalam memfasilitasi pengadaan tanah di lingkungan Kementerian PUPR. Perangkat berupa sistem informasi berbasis web dinilai dapat menjadi solusi era digital saat ini. Sebab, akan dapat di akses melalui jaringan internet dan intranet.

**Hadirnya aplikasi Simonah telah memberikan informasi tentang tanah yang tidak lagi tumpang tindih, dapat diakses serta dapat dilihat oleh seluruh insan Kementerian PUPR baik pusat maupun di daerah.**



Kepala BPIW beserta jajaran meninjau langsung lahan proyek pembangunan Bendungan Tritip, Balikpapan

Sumber: Dok. BPIW

Simonah saat ini sudah disesuaikan dengan format E-Monev yang sudah berjalan di lingkungan Kementerian PUPR. Sehingga, Simonah semakin memudahkan dalam mendapatkan gambaran secara umum terhadap proses pengadaan tanah.

Terlebih, ungkap Samsi, Simonah telah bersifat terpadu, online, dan menggunakan 1 (satu) data dasar, sehingga mudah di monitor dan dievaluasi. "Laporannya juga terstandarisasi serta dapat diakses/cetak secara online," paparnya.

Sistem informasi Simonah berbasis web dengan sistem otorisasi berjenjang, sehingga tingkat data kelirunya semakin kecil. Selain itu juga dilengkapi sistem notifikasi untuk pengadaan tanah yang tersendat. Sehingga, progress pengadaan tanah dapat cepat terbarukan.

Kemudian, terdapat form dan dokumen yang diinput melalui web, sehingga mudah pengguna mengisi data secara otentik dengan otomatisasi dalam pencetakan laporan dengan format khusus. Simonah juga memiliki rekam jejak yang tercatat, sehingga memudahkan dalam meninjau perkembangan.

Lebih lanjut, Samsi menjelaskan, manfaat lain dengan hadirnya Simonah yakni adanya penyajian data komprehensif, sehingga proses pengadaan tanah lebih terorganisir dan lebih tertib administrasi karena dipandu oleh sistem.

"Sistem ini juga dapat bermanfaat sebagai bank data permasalahan tanah. Dalam Simonah terdapat bank data seputar isu permasalahan terkait pengadaan tanah. Data tersebut dapat dipelajari bersama," terangnya.

Samsi memastikan hadirnya Simonah membuat Kementerian PUPR memiliki konsistensi data dalam pertanahan. "Simonah diciptakan dengan azas *"one data policy"*, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, *actual*, *valid*, dan akuntabel, yang dikelola dalam suatu sistem terintegrasi," paparnya.

Ia berharap, pemanfaatan aplikasi Simonah akan dapat mendorong BPIW Kementerian PUPR dapat bertugas memetakan permasalahan proses pengadaan tanah, memantau progress kemajuan pengadaan tanah di tiap Unor dan keseluruhan permasalahan yang telah dikumpulkan akan dapat disusun menjadi draft arahan dan rekomendasi terhadap percepatan penyelesaian permasalahan tanah terhadap seluruh bidang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, dapat mewujudkan BPIW mampu melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR dengan tepat waktu. (\*\*)

# SISTEM MONITORING PENGADAAN TANAH (SIMONAH)

**Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (SIMONAH) Infrastruktur PUPR** merupakan sebuah **sistem informasi pengadaan tanah berbasis web yang meliputi progress, permasalahan, dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengadaan tanah infrastruktur seluruh Kementerian PUPR.**

## PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH INFRASTRUKTUR PUPR

1. **PENGADAAN TANAH YANG TERKENA TANAH KEHUTANAN**

2. **PENGADAAN TANAH YANG TERKENA TANAH PEMERINTAH**

3. **MEKANISME PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN**

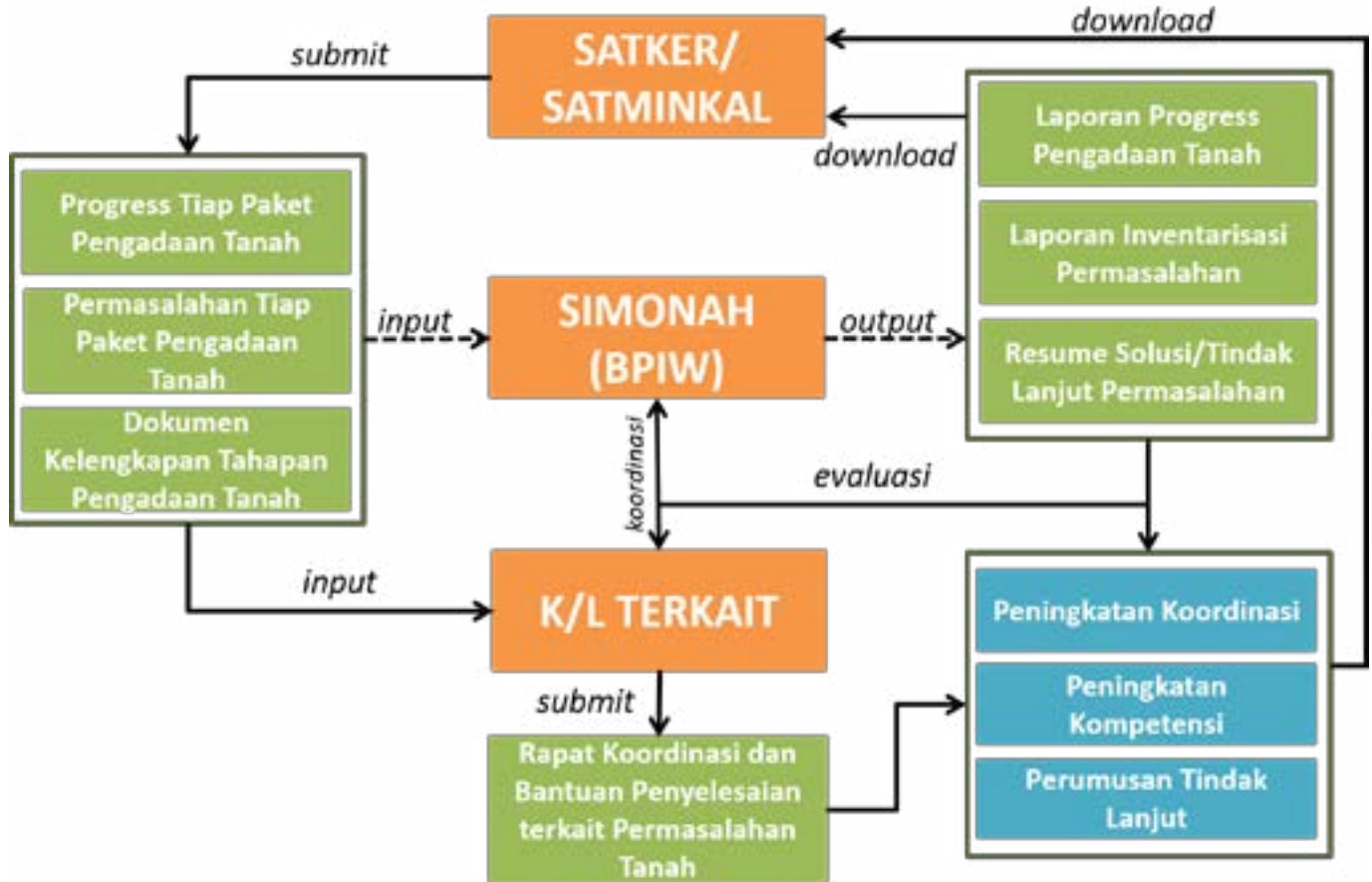
4. **MENGATASI PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PROYEK DAN NILAI UANG GANTI RUGI**

5. **PROSES DAN TAHAPAN PENGADAAN TANAH SECARA UMUM**

6. **SUMBER DANA UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH INFRASTRUKTUR PUPR**



## MEKANISME PENGOPERASIAN SIMONAH



## KESIAPAN TANAH INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2017

<p><b>7%</b> SISA TANAH 2015-2016</p>	<p>Total Kebutuhan Tanah 2015-2016 : <b>16,542.59 Ha</b>                      Progress Pembebasan : <b>11,634.43 Ha</b>                      Sisa Tanah untuk 2017: <b>4,908.16 Ha</b></p>	<p>Bina Marga: <b>3,697.40 Ha</b>                      Sumber Daya Air: <b>1,173.72 Ha</b>                      Cipta Karya: <b>37.04 Ha</b></p>
<p><b>67%</b> KEGIATAN 2017</p>	<p>Total Kebutuhan Tanah Kegiatan 2017:  <b>46,336.49 Ha</b></p>	<p>Bina Marga: <b>18,758.10 Ha</b>                      SDA: <b>27,589.77 Ha</b></p>
<p><b>26%</b> KEGIATAN ON-GOING</p>	<p>Total Kebutuhan Tanah On-Going : <b>23,522.60 Ha</b>                      Progress Pembebasan: <b>5,854.57 Ha</b>                      Kebutuhan Tanah Mulai 2017: <b>17,668.02 Ha</b></p>	<p>Bina Marga: <b>2,169.65 Ha</b>                      Sumber Daya Air: <b>15,465.60 Ha</b>                      Cipta Karya: <b>32.77 Ha</b></p>

# BUDAYA KERJA BPIW



**Dr. Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT**

*Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan  
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR*

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) merupakan badan baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai badan baru, tentunya ada restrukturisasi organisasi yang melibatkan pemberian tugas dan fungsi baru. Selain itu sumber daya manusianya (SDM) yang berasal dari bermacam unit organisasi juga membutuhkan penyesuaian agar dapat bekerja dengan baik, efektif dan nyaman, baik penyesuaian terhadap pekerjaan maupun penyesuaian terhadap lingkungan baru.

memiliki SDM cerdas dan anggaran yang tinggi tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan, yang disebabkan karena budaya kerja yang tidak sesuai. Sebaliknya, unit organisasi yang bergerak di bidang yang sama dengan infrastruktur dan biaya seadanya, bisa tumbuh dengan baik, akibat budaya kerja yang sangat kondusif. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja yang tepat akan mendukung kinerja pegawainya mencapai sasaran mutu BPIW dengan efektif.

Salah satu cara menumbuhkan penyesuaian yang baik antar SDM, diperlukan suatu budaya kerja yang sesuai dengan lingkungan maupun produk yang dihasilkan sesuai tugas dan fungsi serta menunjang produktivitas kinerja. Budaya kerja sebagai Nilai-nilai strategis atau *strategic value* adalah nilai-nilai yang diyakini memberikan spirit atau 'ruh kehidupan' bagi segenap insan BPIW.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi BPIW berupaya menggali nilai-nilai strategis tersebut yang berasal dari khasanah budaya kerja di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya unit organisasi (unor) yang menjadi asal para staf BPIW maupun dari nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya organisasi (*corporate culture*) yang bersifat universal.

Pengembaraan gagasan tersebut melahirkan suatu nilai strategis yang diharapkan mampu melecet motivasi dan kiprah para staf dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan (*customer*) BPIW. Serangkaian diskusi dan perenungan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi BPIW akhirnya membuahkan nilai-nilai

strategis (*strategic value*) yang disebut Terpadu untuk menunjukkan kualitas insan BPIW dan Sinkron untuk menunjukkan kualitas produk BPIW. Konsep tersebut berupa adagium yang diharapkan memberikan semangat berkinerja terbaik bagi pengembangan organisasi BPIW khususnya dan Kementerian PUPR pada umumnya. Adagium tersebut kemudian diuraikan dalam 33 nilai-nilai strategis yang selanjutnya akan dijabarkan dalam 99 perilaku kerja yang diharapkan menjadi rujukan bagi seluruh warga BPIW.

#### A. Kualitas Insan BPIW

Kualitas insan BPIW dijalin dalam suatu adagium TERPADU yang merupakan singkatan dari Transparansi, Egaliter, Rasional, Profesional, Akuntabel, Dinamis, dan Unggul dengan penjelasan pengertiannya masing-masing sebagai berikut:

##### 1. TRANSPARANSI

Transparansi mengandung pengertian kejelasan dan keterbukaan dalam latar belakang dan hasil suatu tujuan, keputusan ataupun langkah kerja suatu

organisasi maupun individu.

Nilai-nilai dasar Transparansi:

1. Menciptakan iklim komunikasi yang terbuka di internal BPIW maupun antar unit organisasi.
2. Menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia.
3. Mengemukakan pendapat secara terbuka, langsung dan beretika.
4. Menciptakan keterbukaan sesuai dengan harapan stakeholders.
5. Menciptakan keterbukaan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi BPIW berupaya menggali nilai-nilai strategis tersebut yang berasal dari khasanah budaya kerja di lingkungan Kementerian PUPR





Kepala BPIW, Rido Matari menerima penghargaan untuk BPIW di Malam Penghargaan PUPR 2016

Sumber: Dok. BPIW

Transparansi atau keterbukaan diharapkan akan mendasari hubungan pribadi (*interpersonal relationship*), antar unor maupun dengan stakeholders. Keterbukaan merupakan salah satu nilai strategis yang sangat dituntut dari *stakeholders* terhadap kebijakan yang dikeluarkan BPIW. Keterbukaan tentunya harus didasari kejujuran, kepatuhan dan rasa saling menghargai. Nilai ini akan menciptakan pola komunikasi yang efektif di seluruh lini, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas bekerja.

## 2. EGALITER

Egaliter mengandung pengertian bahwa insan BPIW dalam melaksanakan tugas senantiasa tidak membedakan kedudukan, keturunan, suku, agama, ras, dan golongan, serta meningkatkan rasa persatuan atau kekompakan yang ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu, sesama Bagian, Bidang, dan sesama Pusat yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik.

Nilai-nilai dasar Egaliter:

1. Memiliki semangat korps yang tinggi.
2. Menjaga nama baik organisasi dan teman sekerja.
3. Saling menghargai baik antar individu maupun antar Bagian, Bidang, dan Pusat.
4. Mengembangkan rasa kekeluargaan dan kesetaraan.
5. Menghormati kepentingan bersama dengan beretika dalam mencapai tujuan organisasi.

Nilai Egaliter sangat berguna untuk menciptakan iklim bekerja yang saling percaya dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Memiliki nilai kebersamaan akan memudahkan

pembentukan *team-work*, dan koordinasi antar Bagian, Bidang, maupun Pusat. Namun demikian nilai kebersamaan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat dan sifat kritis, justru sebaliknya akan memberikan masukan yang positif kepada orang lain.

## 3. RASIONAL

Rasional, mengandung pengertian bahwa Insan BPIW dalam melaksanakan tugas senantiasa menggunakan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan.

Nilai-nilai dasar Rasional:

1. Mempunyai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) sesuai dengan persyaratan organisasi.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam bekerja.
3. Menilai kinerja pegawai secara obyektif dan konsekwen.
4. Mengembangkan perilaku teliti secara profesional.
5. Memahami dan menerapkan visi dan misi BPIW.

Nilai Rasional merupakan nilai strategis yang sangat diperlukan dan menjadi dasar BPIW untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, nilai rasional ini harus mewarnai pelaksanaan seluruh tugas BPIW.

## 4. PROFESIONAL

Profesional, mengandung pengertian bahwa insan BPIW bekerja

dalam suatu target kinerja dan tatalaku yang memenuhi baku kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh suatu jabatan tertentu, baik jabatan fungsional maupun struktural.

Nilai-nilai dasar Profesional:

1. Pendidikan tinggi yang memberikan kecendekiaan pengalaman luas dan terstruktur
2. Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebijakan sesuai profesi yang digeluti.
3. Kerja seorang profesional berlandaskan pada kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan.
4. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral dengan menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik pada organisasi profesinya.
5. Terorganisasikan

Nilai Profesional merupakan nilai strategis bagi insan BPIW dalam pelaksanaan tugasnya agar selalu berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi, per-UU-an yang berlaku, inovatif, bertanggungjawab, bersifat netral, dan selalu menjunjung nilai-nilai kepatutan yang bersifat universal, serta senantiasa berorientasi pada kepentingan pelanggan secara adil dalam bertugas;

### 5. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas, mengandung pengertian pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing individu atas semua tindakan yang diambil beserta konsekuensinya, terutama dalam hal penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan.

Nilai-nilai dasar Akuntabilitas:

1. Memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
2. Memenuhi harapan stakeholders.
3. Menghasilkan produk dengan kualitas standard yang ditetapkan.
4. Melakukan yang terbaik untuk pencapaian tugas.

5. Mempertanggungjawabkan kesalahan sesuai wewenangnya. Akuntabilitas adalah *value* yang sangat penting di masa depan. Nilai ini harus dipunyai dan dipelihara di semua level organisasi, sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk dapat mempertanggung-jawabkan setiap kebijakan yang dikeluarkan kepada lingkungan internal maupun kepada publik. Unit organisasi yang memelihara nilai ini tercermin dari perilaku individu yang peduli terhadap pencapaian goal dan kepuasan *customer*-nya, atasannya, rekan sekerja maupun masyarakat yang dilayani.

### 6. DINAMIS

Dinamis, mengandung pengertian bahwa Insan BPIW dalam melaksanakan tugas senantiasa gembira, penuh semangat dan tenaga, serta fleksibel dalam penyelesaian masalah.

Nilai-nilai dasar Dinamis yakni :

1. Riang gembira;
2. Penuh semangat;
3. Antusias, dan
4. Fleksibel dalam penyelesaian masalah.

Dinamis adalah nilai strategis dalam hidup ini. Kata dinamis dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak, dan terus tumbuh. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju dalam suasana yang bergairah, semangat yang berapi-api atau bisa juga disebut sebagai "terobsesi" terhadap sesuatu (yang ingin dicapai). Mengedepankan kedinamisan dalam hidup secara serta merta akan mengubah cara berpikir kita, perasaan dan tindakan, serta menjauhkan kita dari segala yang berbau negatif. Mengisi seluruh rongga hidup kita dengan kekuatan dinamis tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi sekaligus menjadi alat perekat dalam berkomunikasi di dalam keluarga dan antar komunitas.



Konsistensi BPIW dalam melakukan pembinaan SDM.

Sumber: Dok. BPIW

## 7. UNGGUL

Unggul, mengandung pengertian bahwa insan BPIW dalam melaksanakan tugas senantiasa berusaha menghasilkan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya, inovatif dan kreatif, kuat pendiriannya, tidak mudah goyah serta tidak mudah putus asa.

Nilai-nilai dasar Unggul yakni:

1. Selalu berusaha yang terbaik dan lebih baik
2. Inovatif dan kreatif, dan
3. Kuat pendirian,
4. Tidak mudah putus asa.

Sifat Unggul bagi individu atau komunitas adalah nilai strategis dalam memastikan kualitas produk suatu lembaga yang dikelola dalam sistem manajemen mutu dengan beberapa ciri sebagai berikut:

- Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja.
- Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia.
- Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia.
- Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita serta kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah.

## B. Kualitas Produk BPIW

Sedangkan budaya kerja insan BPIW dalam konteks produk dinyatakan dalam bentuk adagium Sinkron yang merupakan singkatan dari *Sustainable, Integrated, Necessary, Komprehensif, Reachable, Obyektif*, dan *Natural* dengan penjabaran pengertiannya sebagai berikut:

1. *Sustainable*: produk yang dihasilkan Insan BPIW senantiasa ramah lingkungan ekosistem dan sosial juga dengan prinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.”

2. *Integrated*: produk yang dihasilkan Insan BPIW senantiasa mempunyai keterkaitan atau saling berhubungan dalam meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
3. *Necessary*: produk yang dihasilkan insan BPIW senantiasa dilakukan secara efektif dan efisien serta hanya yang betul-betul diperlukan oleh pihak terkait, mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia.
4. *Komprehensif*: produk yang dihasilkan insan BPIW senantiasa tepat, akurat, menyeluruh, dan tuntas.
5. *Reachable*: produk yang dihasilkan insan BPIW senantiasa dapat dijangkau, mudah difahami dan mudah dimanfaatkan (*user friendly*) oleh semua sektor atau pihak yang terkait;
6. *Obyektif*: produk yang dihasilkan insan BPIW senantiasa merupakan keadaan yang sebenarnya sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi sesuai mekanisme baku yang ditetapkan oleh institusi tanpa ditunggangi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu yang menyimpang dari tugas dan fungsi;
7. *Natural*: produk yang dihasilkan insan BPIW senantiasa bersifat alami dengan mengakomodasi kepentingan bersama untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.



# Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



# PENERAPAN GREEN INFRASTRUCTURE DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

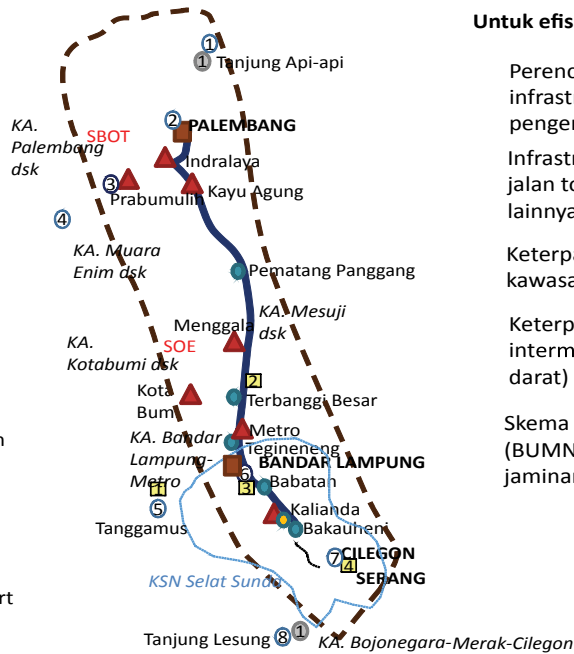
Kementerian PUPR terus melakukan upaya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan tersebut dalam bentuk Green Infrastructure atau infrastruktur yang memperhatikan masalah penghijauan



## 1 Perencanaan Terpadu dan Cerdas



- LEGEND**
- National Activity Center
  - Regional Activity Center
  - New Growth Center (Toll Road Interchange)
  - MBBPT Affected Region
  - Toll Road, Railway, and High Voltage Transmission Plan
  - Special Economic Zone (KEK)
  - Potential Zone (KP)
  - Industrial Zone (KI)
  - Priority Zone (KA)
  - National Strategic Area (KSN)
  - Capacity Expansion Plan of Ferry Port
  - 1.000 MW Power Plant Plan



### Untuk efisiensi sumber daya

Perencanaan terpadu antara infrastruktur dan pengembangan kawasan  
Infrastruktur terpadu untuk jalan tol, kereta api, dan utilitas lainnya

Keterpaduan di dalam dan antar kawasan (KEK, KI, KSN)

Keterpaduan transportasi intermoda (maritim and darat)

Skema Pembiayaan Inovatif (BUMN, penugasan dengan jaminan negara dan fasilitas)

### Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Infrastruktur di WPS MBBPT

## 2 Pengelolaan Air dan Energi



## 3 Penyediaan RTH



Kebijakan 30% RTH:

- Pengembangan Taman Tematik
- Sebaran RTH di berbagai tingkat (city wide, kecamatan, kelurahan)
- Peran RTH yang bervariasi (lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dll)

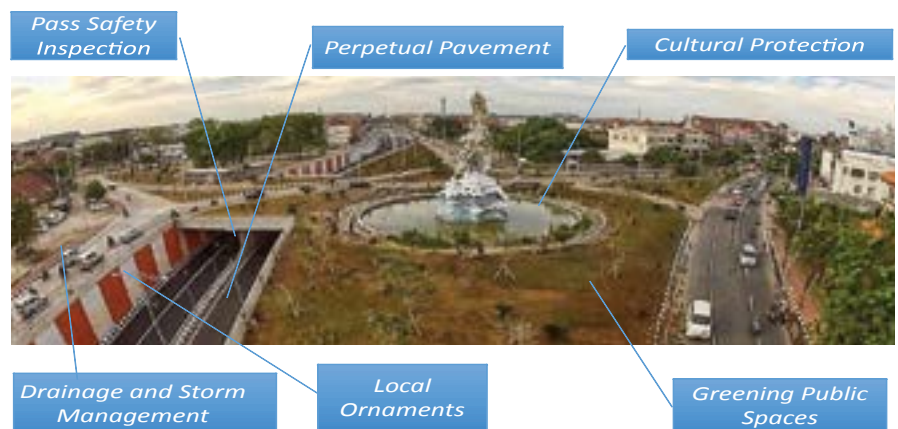




## 4 Green Building



## 5 Sistem Transportasi Cerdas



## 6 Pemanfaatan ICT untuk Transportasi - Cloud Computing



Komputasi awan (Cloud Computing) adalah teknologi untuk dapat menggunakan/ memanfaatkan baik infrastruktur, platform, maupun aplikasi dari mana saja kapan saja dengan memanfaatkan fasilitas internet (terhubung kedalam jaringan internet)

# Keindahan Alam yang Memikat di Lembata

Banyak pulau di Indonesia memiliki keindahan alam yang memanjakan mata, dan sangat cocok untuk melepas lelah dari kesibukan sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah keindahan alam di Pulau Lembata yang berada di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lembata merupakan salah satu nama dari gugus kepulauan di Kabupaten Flores Timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. Berada di dekat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 19 Kupang-Atambua, Lembata memiliki beberapa obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Kementerian PUPR juga direncanakan akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Perjalanan menuju destinasi wisata ini, dapat melalui jalur udara. Bila dari Jakarta, perjalanan menuju Lembata dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat melalui Kupang. Perjalanan dari Jakarta ke Kupang memakan waktu selama 3 jam. Kemudian dari Kupang hanya 30 menit menuju Lembata. Perjalanan yang cukup memakan

waktu itu, terbayar dengan keindahan yang mempesona.

Setidaknya, ada 5 destinasi mengagumkan yang layak dikunjungi di Pulau Lembata. Pertama, desa nelayan Lamalera, Wulandoni. Desa ini memiliki pantai yang disebut Pantai Lamalera. Tidak hanya memiliki pantai yang indah dengan pasir putihnya, desa tersebut terkenal dengan para nelayan yang gagah berani yang

---

*Setidaknya, ada 5 destinasi mengagumkan yang layak dikunjungi di Pulau Lembata. Pertama, desa nelayan Lamalera, Wulandoni. Desa ini memiliki pantai yang disebut Pantai Lamalera.*

---

memiliki tradisi penangkapan ikan paus dengan cara tradisional. Di desa ini, anda setiap saat dapat menyaksikan bagaimana ketahanan warganya untuk bertahan hidup dengan alam desa yang bercadas. Uniknyalagi desa ini menghasilkan banyak orang cerdas dan sukses. Untuk mencapai desa ini, relatif tidak sulit

lantaran akses transportasi baik dari Kota Lewoleba melalui jalur darat maupun dari mana saja melalui jalur laut, semua tersedia. Hanya saja, Anda mungkin perlu stamina untuk menghadapi kondisi jalan raya yang jauh dari kelayakan sebagai sebuah akses menuju destinasi wisata. Kedua, Tanjung Nuhanera, Lebatukan. Ekstotika pulau Lembata itu di Tanjung Nuhanera. Betapa tidak, lekak-lekuk pulau dalam radius yang tidak jauh, bisa anda nikmati sambil mendayung sampan atau perahu di hamparan teluk yang nyaris tak pernah bergejolak oleh gelombang. Letaknya tidak jauh dari Lewoleba dan didukung oleh akses jalan raya yang relatif lebih baik dibandingkan kondisi di belahan Lembata yang lainnya. Masyarakat lokal Nuhanera mempercayai bahwa tempat mereka adalah tempat tinggal leluhur, sehingga ada kearifan laut tertentu yang harus dituruti demi menjaga kawasan ini.

Pesona yang ketiga adalah Bukit Doa dan Bukit Cinta, Bour, Nubatukan. Bukit tersebut hanya sekira 20 menit dari Kota Lewoleba, Lembata. Anda bisa menjumpai satu destinasi terdekat dan paling ramai di pulau ini. Bukit Doa dan Bukit Cinta yang juga



Senja di Bukit Cinta di pulau Lembata NTT

sering disebut sebagai Wolor Pass dengan monumennya yang gagah terpajang dan indah dilihat dari laut. Setiap petang hari, banyak orang yang datang dan sekadar menikmati keindahan pemandangan yang dibalut oleh kemuning warna matahari yang beranjak turun hingga hilang dalam gelap malam.

Tidak jauh dari situ, ada juga bukit doa dengan track jalan salib menuju puncak bukit, tempat dimana peziarah akan menemukan megahnya patung Bunda Maria di puncak itu. Kawasan ini tampaknya akan diarahkan menjadi zona wisata dengan penataan yang terus dilakukan oleh Pemda maupun yayasan yang mengelola tempat wisata rohani ini.

Keempat, Puncak Ile Lewotolok, Ile Ape. Ile Lewotolok adalah sebuah gubung berapi yang terletak di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Lembata. Untuk memulai pendakian, anda tidak butuh waktu yang lama untuk menjangkau titik start memulai tracking di wilayah Ile Ape Timur, tepatnya di Desa Lamagute.

Menempuh rute yang tidak mudah dan penuh tantangan, dibutuhkan stamina yang cukup untuk bisa menjangkau kawah. Namun, bagi mereka yang pernah menjangkau titik ini, hilang semua lelah saat

menyaksikan keindahan pemandangan di hamparan kawah gunung itu. Kelima, Pantai Bean, Buyasuri. Keindahan alam Pantai Bean dengan hamparan air laut biru sangat mempesona. Bahkan banyak orang yang menyamakan keindahan Pantai Bean dengan Pantai Phuket di Thailand. Keindahan panorama pantai dengan hamparan pasir putih serta hempasan ombak yang cukup besar, serta tebing dan gua alam. Pantai Bean merupakan pantai pasir putih yang unik dengan pasir putih dalam bentuk kristal-kristal halus yang membentang dari barat ke timur sejauh kurang lebih 5 km dengan ombak laut yang bergulung terus menerus dan pecah secara teratur.

Pantai Bean terletak di ujung Pulau Lembata yang berhadapan langsung dengan Pulau Alor. Terletak di Desa Bean Kecamatan Buyasuri dengan jarak tempuh 82 km dari pusat Kota Lewoleba, untuk menuju ke lokasi tersebut dapat ditempuh dengan angkutan darat.

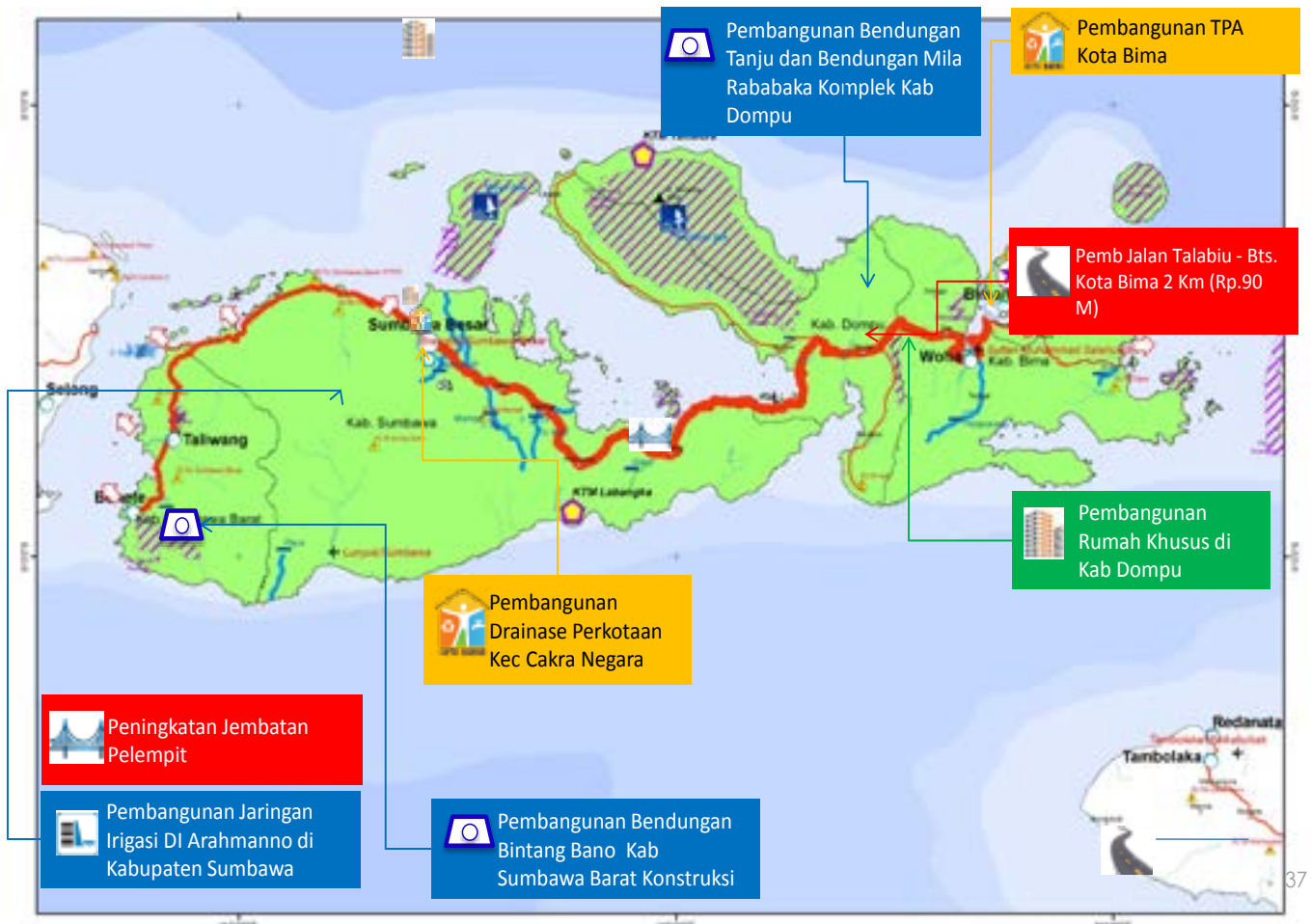
Di seputaran pantai ini tidak ada pasar ataupun hotel. Untuk sinyal dan listrik saja masih sangat minim. Namun pihak desa setempat akan mengusahakan homestay untuk para pengunjung. Boleh juga membawa perlengkapan kemah sendiri

dan bekal seadanya, mengenai makanan ringan kita bisa membelinya di kios-kios warga sekitar atau bisa juga membelinya di pusat kecamatan tapi kalau di pusat kecamatan lumayan jauh dan menguras banyak tenaga. Dengan pesona dimiliki dan dengan dukungan infrastruktur PUPR akan menunjang peningkatan kunjungan wisatawan, terutama mancanegara di daerah ini. **Hendra/Indira**



Sumber: Dok.BPIW

# Wilayah Pengembangan Strategis 17 Sumbawa Besar-Dompu-Bima 2025



## Ultimate

Program ultimate pada WPS 17 Sumbawa Besar-Dompu-Bima sampai tahun 2025 direncanakan akan mendukung pembangunan infrastruktur berbagai kawasan, diantaranya Agroindustri pototano dengan sektor unggulan pertanian dan industri. Selanjutnya Agropolitan lingkaran tambang batu hijau dan dodo rintu dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Dukungan infrastruktur juga dilakukan terhadap Bandara Brangbiji, yang merupakan bandara kelas domestik/ pengumpan. Kemudian juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan Bandara Sultan M. Salahuddin. Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan Pelabuhan Badas (Pelabuhan Pengumpul), Pelabuhan Benete (Kelas : Pelabuhan Khusus), dan Pelabuhan Pototano (Kelas : Pelabuhan Pengumpul). Program ultimate WPS juga terkait pembangunan Bendungan Tanju Mila, perumahan di kawasan perkotaan, dan Infrastruktur Cipta Karya Terpadu di Kawasan Perkotaan.

## Program Utama 2017

Program utama WPS 17 Sumbawa Besar-Dompu-Bima pada tahun 2017 ini, akan dilakukan pembangunan pada beberapa sektor, diantaranya sektor Sumber Daya Air (SDA), dengan melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Arahmanno di Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga dilakukan Konstruksi Pembangunan Bendungan Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat dan Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Rababaka Komplek Kab. Dompu. Kemudian Bina Marga membangun Jalan Talabiu - Bts. Kota Bima 2 Km.

Untuk Cipta Karya, akan membangun Drainase Perkotaan Kec. Cakra Negara dan pembangunan TPA Kota Bima. Selanjutnya dilakukan Peningkatan Jembatan Pelempit. Sedangkan untuk Ditjen Perumahan pada tahun 2017 ini akan membangun Rumah Khusus di Kab. Dompu.

# Wilayah Pengembangan Strategis 18

## Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere 2025

### Ultimate

Program ultimate pada WPS 18 Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere sampai tahun 2025 sampai tahun 2025, yakni dukungan terhadap pengembangan Bandara Komodo, Soa, dan Sales Leda. Dukungan infrastruktur PUPR juga untuk pengembangan Pelabuhan Pengumpan Maropokot, Pelabuhan Pengumpan Maumere, Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo, Pelabuhan Pengumpan Komodo, dan Pelabuhan Pengumpan Waikelo.

Selain itu, dukungan Kementerian PUPR juga dilakukan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dsb, Waikabubak – Marupeli Tanah Dara dsb, dan KSPN Ende-Kelimutu dsb. Kemudian juga direncanakan beberapa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, seperti Infrastruktur Cipta Karya Terpadu di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Ditjen Sumber Daya Air (SDA) akan membuat Bendungan Mbay, Ditjen Bina Marga akan membangun Jalan Lintas Flores, dan Ditjen Perumahan akan membangun Rumah Umum Tapak Layak Huni.

### Program Utama 2017

Program utama WPS 18 Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere pada tahun 2017 ini, dimana akan dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti Ditjen Perumahan akan membangun Bantuan Rumah Swadaya 2000 Unit. Sedangkan Cipta Karya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kws Kelimutu KawPaupire KawKota Raja dan Kws Mautapaga..



# Teknologi *Flyslab*, Lantai Beton Bertingkat Jadi Efisien



Proses Pengerjaan *Flyslab* pada Bangunan

Dalam setiap tantangan selalu ada peluang. Hal itulah yang diyakini Hartoko Budhiono dan tim *Flyslab*. Tantangan yang menjadi kegelisahan saat itu adalah biaya membuat bangunan beton/dak yang mahal, sehingga Hartoko Budhiono dan tim *Flyslab* untuk mencari solusi agar proses membuat dak cepat, tepat guna, dan murah.

Setelah melalui riset sejak tahun 2008 yang dilakukan Ir. Sulistyana MT, tim akhirnya berhasil mendapatkan solusi, yakni teknologi beton *Flyslab*. Kini teknologi tersebut telah dipatenkan serta mendapat sertifikasi ISO.

"Membuat beton dak konvensional itu mahal. Bahkan, setelah prosesnya banyak yang terbuang percuma seperti bambu, triplek, kawat bendrat, dan paku, jika memakai beton *Flyslab*, seperti bambu, triplek, kawat bendrat, dan paku tidak diperlukan," jelas Hartoko Budhiono, Direktur PT Kinarya Beton Salatiga.

Dengan begitu, beton cara *Flyslab* pun masuk kategori ecogreen. Hartoko mengatakan, *Flyslab* adalah beton berongga namun tidak mengurangi kekuatannya. Satu meter per segi beton *Flyslab* dibanderol dengan harga Rp 400 ribu. Biaya tersebut sudah termasuk gambar detail. Adanya penggambaran ini untuk menghindari kesalahan dan membuka terjadinya diskusi dua arah termasuk masukan dari konsumen.

Keunggulan beton *Flyslab* adalah mampu menahan kekuatan secara terukur. "Beton kami siap untuk membangun rumah tinggal, jembatan, bangunan *high risk*," terangnya.

Saat ini tim *Flyslab* sedang membangun hotel dan stadion. Dikatakan, PT Kinarya Beton Indonesia sudah beroperasi di seluruh Indonesia dengan sistem perwakilan. "Kami akan terus ekspansi ke berbagai daerah untuk menekan biaya transportasi dan pekerja," ucapnya.



Selain beton, *Flyslab* juga mengembangkan bata ringan, mortar, baja ringan, dan genteng metal. “Kami memberi layanan *one stop service* untuk segala pekerjaan konstruksi,” jelasnya.

*Flyslab* adalah produsen dan konsumen bisa langsung melihat proses pembuatannya. Tujuannya, agar mengedukasi masyarakat tentang material ramah lingkungan yang tepat guna.

Beton *Flyslab* merupakan beton produk pracetak dari plat beton panel seluler yang merupakan plat beton ringan dengan memakai beton mutu tinggi K-400 dan besi tulangan U-39. Reduksi massa beton *Flyslab* mencapai 50% dibandingkan plat beton konvensional, sehingga penggunaan *Flyslab* sangat menguntungkan pada bangunan bertingkat, baik dari struktur bangunan maupun manajemen konstruksi.

Hartoko mengatakan, kedepan bangunan di kota-kota akan dibangun secara bertingkat karena harga tanah yang sangat mahal, untuk memenuhi kebutuhan ruang ini, maka *Flyslab* hadir menjadi solusi membangun gedung bertingkat.

Dengan beton *Flyslab* didapatkan struktur plat lantai beton yang ringan dan mempunyai kapasitas yang sama dengan plat beton

konvensional, maka hal ini sangat menguntungkan di bidang konstruksi bangunan. Upaya untuk mendapatkan bangunan bertingkat yang lebih murah dengan menggunakan plat beton panel *Flyslab* adalah sangat tepat

Efisiensi biaya konstruksi dengan menggunakan *Flyslab* mencapai 30% dibandingkan dengan cara konvensional. Saat ini berbagai penghargaan dari berbagai lembaga dan asosiasi telah diraih.

Awalnya beton *Flyslab* merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ir. Sulistyana MT. Penelitian itu dilakukan dalam rangka untuk menyusun tesis pada Program Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang, sehingga secara analitis maupun berbagai uji material sudah dilakukan sesuai kaidah-kaidah akademis, Laboratorium Bahan dan Konstruksi Universitas Diponegoro Semarang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan ASTM Internasional. (\*/berbagai sumber)

Beton *Flyslab* merupakan beton produk pra-cetak dari plat beton panel seluler yang merupakan plat beton ringan dengan memakai beton mutu tinggi K-400 dan besi tulangan U-39. Reduksi massa beton *Flyslab* mencapai 50% dibandingkan plat beton konvensional

# Menuju Pembangunan yang Berkeadilan

Rapat Kerja (Raker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2017 yang mengambil tema "Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkeadilan" di Gedung Serba Guna (GSG) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (17/1)



Penandatanganan lelang dini di Kementerian PUPR



Menteri PUPR beri motivasi agar peserta raker makin semangat



Kepala BPIW ungkap capaian kinerja BPIW 2015-2016



Sosialisasi program 2017



# Pembinaan PUPR Bebas Korupsi dan Narkoba

Pelaksanaan kegiatan “Pembinaan Generasi Muda PUPR Bebas Korupsi dan Bebas Narkoba” di Gedung Serba Guna (GSG) Kementerian PUPR, Rabu (25/1).



Membuka kegiatan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya



Kampanye bahaya narkoba



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan turut mendampingi Menteri PUPR



Suasana peserta saat memberikan yel-yel

# Rapat Koordinasi BPIW TA 2016-2017

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2017, Jumat (6/1). Berikut dokumentasi kegiatan tersebut :



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat memberikan arahan



Kebersamaan usai rakor



Peserta rakor



Suasana diskusi



## 7 Cara Meningkatkan Produktivitas Kerja

Awal tahun, merupakan langkah pertama kita, dalam meraih hasil maksimal pada pekerjaan yang kita jalani sepanjang tahun ini. Agar meraih sukses pada pekerjaan yang dilakukan, maka ada 7 cara untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ketujuh cara itu adalah :

### 1. Rencanakan apa yang akan dikerjakan

Biasakan merencanakan pekerjaan anda. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, merencanakan pekerjaan sehari sebelumnya. Kedua, merencanakan pekerjaan mingguan di Minggu sore atau malam.

### 2. Perkirakan waktu pengerjaan

Setelah merencanakan, anda juga perlu memperkirakan waktu pengerjaannya. Akan lebih baik, anda membuat strategi untuk menyelesaikan pekerjaan yang anda lakukan lebih cepat dari sebelumnya.

### 3. Fokus pada 3 Tugas Terpenting

Setiap pekerjaan yang ada, fokuskan

pada 3 tugas yang didasari pada tingkat kepentingannya. Usahakan melakukan pekerjaan lebih awal dari biasanya. Misalnya dengan memulai pekerjaan dari pukul 08.00 pagi. Dengan melakukan hal itu, maka stamina dan konsentrasi masih cukup baik.

### 4. Hilangkan Gangguan

Sebagus apapun anda merencanakan pekerjaan, maka tidak akan banyak membantu bila anda mendapat banyak gangguan. Tidak ada jalan lain, anda harus menghilangkan gangguan-gangguan yang akan muncul, sehingga anda akan lebih fokus pada pekerjaan anda. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti matikan atau senyapkan telepon genggam anda dan hindari teman kerja yang malas.

### 5. Delegasikan tugas yang kurang penting

Cara lain untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah mendelegasikan tugas-tugas yang kurang penting kepada bawahan anda (jika anda seorang atasan). Dengan cara ini, anda juga memberikan kepercayaan kepada

bawahan anda untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

### 6. Lakukan kaji ulang mingguan

Aktivitas ini mudah dilakukan, karena anda tinggal membandingkan pekerjaan yang selesai dengan target atau rencana pekerjaan anda. Jika target pekerjaan belum tercapai, anda harus mengetahui penyebabnya, dan di lain hari, hindari penyebab tersebut, agar anda lebih produktif.

### 7. Lakukan olahraga secara teratur

Dengan berolahraga secara teratur, maka stamina dan konsentrasi anda akan pulih dengan cepat. Bila anda karyawan yang bekerja dari pagi hingga sore, jangan tidur sepulang kerja. Usahakan berolahraga minimal 30 menit, misalnya dengan jalan kaki atau lari.

# Membangun Kota Butuh Partisipasi Seluruh Elemen Masyarakat



## Dr. Burhan Abdurahman

Wali Kota Ternate

Dalam membangun kota agar terlaksana sesuai harapan masyarakat luas, memerlukan partisipasi nyata seluruh elemen masyarakat. Terutama, warga kota itu sendiri. Demikian yang diyakini Wali Kota Ternate, Dr. Burhan Abdurahman saat ditemui "Sinergi", beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Pak Dur ini menjelaskan, keberadaan partisipasi nyata dari masyarakat sangat

memiliki nilai strategis karena akan menciptakan kepercayaan dalam mewujudkan pengembangannya.

Berbekal keyakinan tersebut, lanjut Pak Dur, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate salah satunya senantiasa mendukung dan memfasilitasi gerakan Barifola, yakni gotong royong bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diinisiasi Ikatan Keluarga Tidore (IKT). "Walau digagas IKT, sasaran gerakan Barifola ini untuk semua masyarakat Kota Ternate yang rumahnya sudah tak layak huni," terangnya.

Setiap unit rumah yang dibangun atau renovasi rata-rata membutuhkan dana sekitar Rp 40 juta tanpa biaya tukang, namun berkat gerakan Barifola pembangunan atau renovasi rumah MBR itu dapat terlaksana tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Melalui gerakan Barifola, masyarakat menyumbang tenaga, termasuk menyumbang bahan bangunan. Dana untuk membiayai Barifola semua dilakukan atas kekuatan internal," papar Pak Dur. Ia melanjutkan, saat ada pihak yang menyumbang tentu tidak akan ditolak, namun gerakan Barifola pantang meminta sumbangan.

Abdurahman mengungkapkan, saat ini melalui gerakan Barifola di Kota Ternate telah berhasil membangun lebih dari 169 rumah yang tak layak huni menjadi rumah layak huni.

Pria berdarah Tidore ini berharap, gerakan Barifola tersebut dapat diikuti pemerintah daerah dan masyarakat luas di Tanah Air. Dengan begitu, program satu juta rumah yang telah digulirkan Pemerintah Pusat akan dapat makin cepat terwu-

jud serta pelaksanaannya akan terasa lebih ringan karena terbantu partisipasi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Terkait pengembangan Kota Ternate, Abdurahman menyatakan, Pemkot Ternate telah merencanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Ternate, Pulau Tidore dan Pulau Maitara guna melancarkan mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat antar ketiga pulau yang berdekatan tersebut.

Untuk pembangunan jembatan tersebut, lanjutnya, memang membutuhkan dana yang tak sedikit, sehingga Pemkot Ternate terus memperjuangkan untuk mencari pembiayaannya kepada berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat karena kalau hanya menggunakan APBD Ternate akan sulit dan memakan waktu lama dalam mewujudkannya.

Pembangunan jembatan tersebut sangat strategis bagi pengembangan kawasan di Indonesia bagian Timur, khususnya Kota Ternate, Tidore dan Maitara. Sebab, keberadaan jembatan tersebut tidak hanya melancarkan mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat, namun juga mendukung pengembangan Ternate sebagai pusat jasa dan perdagangan.

Ia menuturkan, kendala utama yang dihadapi Ternate terkait pengembangan sebagai pusat jasa dan perdagangan adalah keterbatasan lahan. Sebab, Pulau Ternate relatif kecil serta sebagian besar wilayahnya merupakan gunung yang tidak memungkinkan untuk menjadi lokasi pembangunan sarana dan prasarana.

Dengan begitu, Ternate memerlukan wilayah penyangga. "Adapun yang memungkinkan menjadi daerah penyangga Ternate adalah Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Terlebih, kedua pulau itu yang masih memiliki lahan cukup luas," terangnya.

Selama ini hubungan transportasi antara Ternate-Maitara-Tidore hanya mengandalkan kapal feri dan speed baot, sehingga apabila dikaitkan dengan keinginan menjadikan Maitara dan Tidore sebagai penyangga Ternate masih kurang efektif dan efisien. "Terutama saat cuaca buruk di perairan di sekitar ketiga pulau ini," tegasnya. **(ris/infoBPIW)**

"Gerakan Barifola tersebut dapat diikuti pemerintah daerah dan masyarakat luas di Tanah Air. Dengan begitu, program satu juta rumah yang telah digulirkan Pemerintah Pusat akan dapat makin cepat terwujud serta pelaksanaannya akan terasa lebih ringan karena terbantu partisipasi nyata dari seluruh elemen masyarakat,"

## Info Terbaru !!!

Sebagai ajang interaksi Buletin Sinergi dengan pembacanya, maka mulai edisi Februari 2017, akan dihadirkan rubrik baru yang diberi judul :

## “BPIW Menjawab”

Dalam rubrik ini anda dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan BPIW. Misalnya, anda dapat menanyakan mengenai tugas dan fungsi BPIW.

**Kirimkan pertanyaan anda melalui email :**

[humasbpw@gmail.com](mailto:humasbpw@gmail.com)

atau melalui medsos BPIW: twitter, facebook, dan Instagram.

 @informasiBPIW

 @informasiBPIW

 BPIWkementerianPUPR

Jawaban pertanyaan anda akan dimuat di edisi Februari 2017. Setiap pertanyaan yang dimuat akan diberi cinderamata menarik!!

**Ayoo... tunggu apa lagi... ikuti rubriknya, dapatkan cinderamata cantik dari BPIW...!!!**

